

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI MIN PECABEAN
KABUPATEN TEGAL**



**LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL
Diajukan Kepada LPPM IAIN Purwokerto**

**Oleh:
Abu Dharin, M.Pd**

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abu Dharin, M.Pd

NIP : 19741202 201101 1 001

Jabatan : Dosen Tetap IAIN Purwokerto

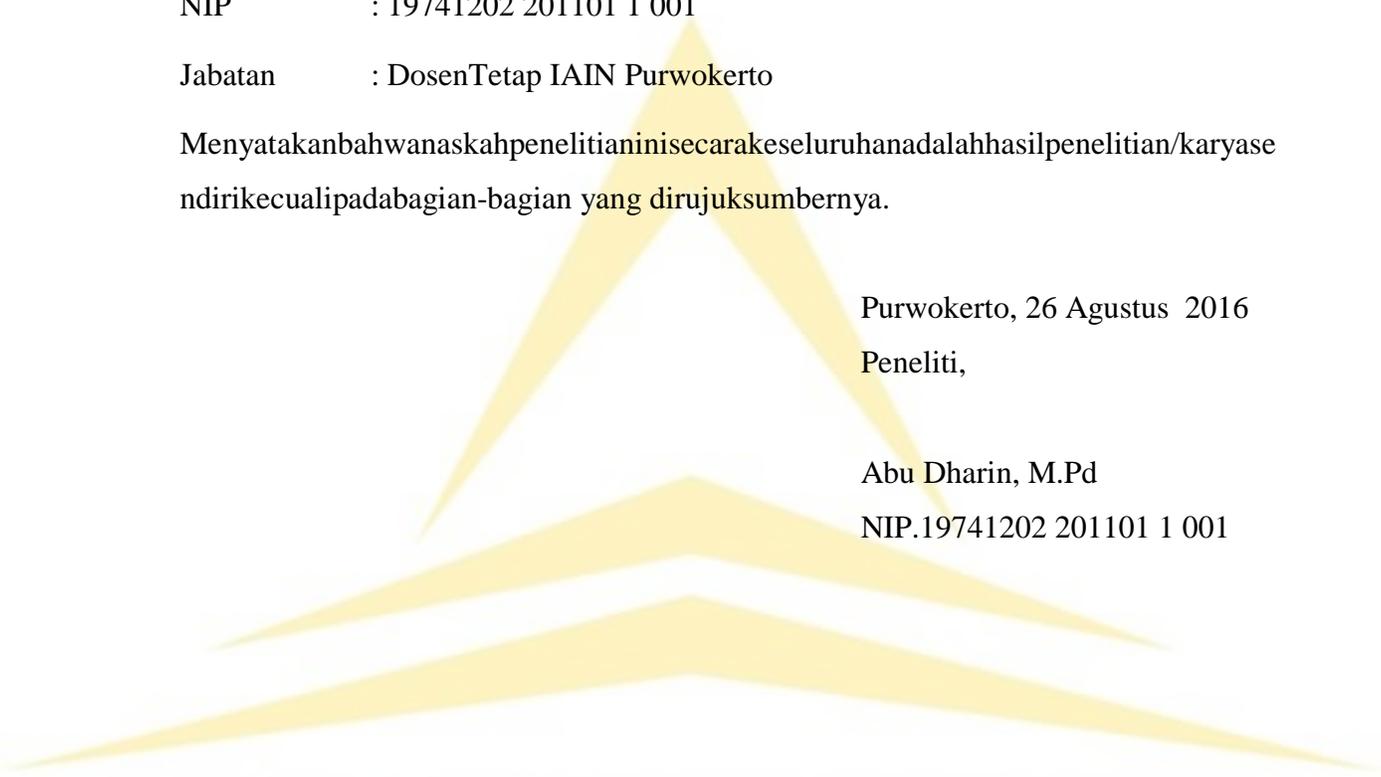
Menyatakan bahwa naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyanya sendiri ke cakupannya bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Agustus 2016

Peneliti,

Abu Dharin, M.Pd

NIP.19741202 201101 1 001



IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Judul Penelitian: Pendidikan Antikorupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

Peneliti : Abu Dharin, M.Pd

Jabatan : Dosen Tetap IAIN Purwokerto

NIP : 19741202 201101 1 001

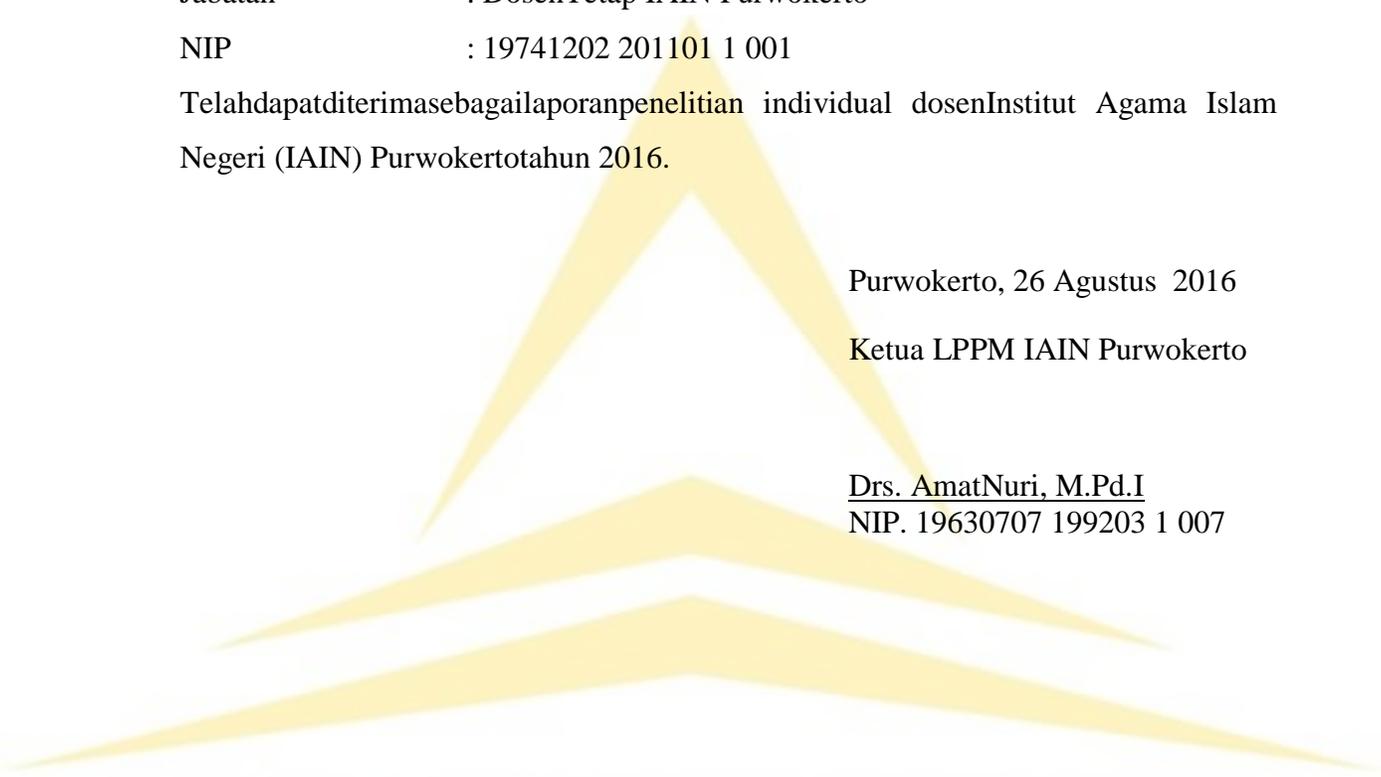
Telah dapat diterima sebagai laporan penelitian individual dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016.

Purwokerto, 26 Agustus 2016

Ketua LPPM IAIN Purwokerto

Drs. Amat Nuri, M.Pd.I

NIP. 19630707 199203 1 007

The logo of IAIN Purwokerto is a large, stylized yellow triangle with a white outline, composed of three smaller triangles stacked vertically. Below the logo, the text "IAIN PURWOKERTO" is written in a bold, grey, sans-serif font.

IAIN PURWOKERTO

ABSTRAK

Judul: Pendidikan Antikorupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

Masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?; 2) Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?; 3) Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal? Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu:

1) Untuk menganalisis Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal; 2) menganalisis Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal; 3) menganalisis Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu: jenis penelitiannya penelitian dengan pendekatan kualitatif jenisnya naturalistik, sumber data primer penelitian adalah Kepala MIN Pecabean dan Guru, staff administrasi serta siswa MIN Pecabean. Metode pengumpulan data dengan interview, observasi dan dokumentasi. Penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif *model Miles and Huberman*.

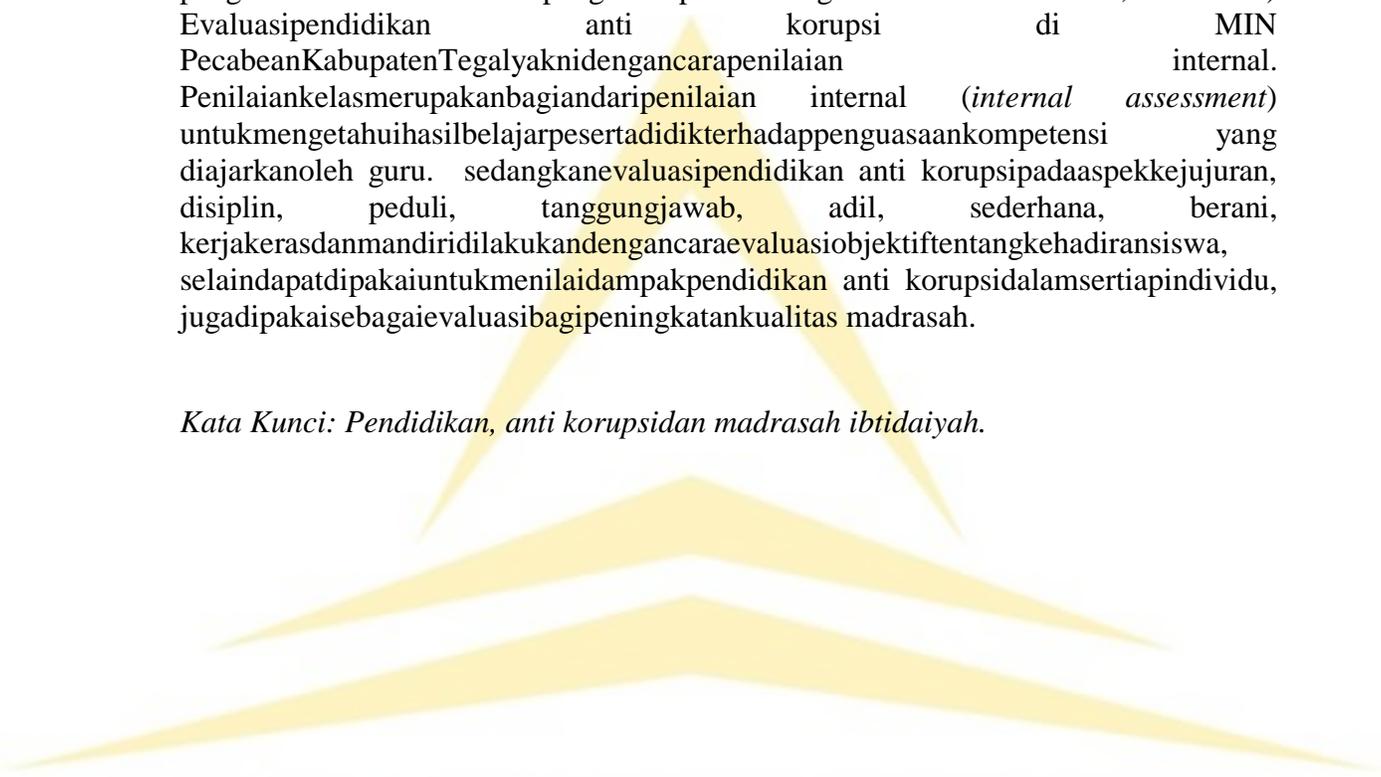
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai berikut: a) Sistem rekrutmen siswa baru MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara seleksi bukalantes, dengan cara *interview*, jumlah siswa baru yang diterima dibatasi jumlahnya sesuai dengan daya tampung kelas yang disediakan yaitu 2 kelas atau 56 siswa, sebab satu kelas maksimal 28 siswa. disamping itu orang tua/waliseswajuga di *interview* dan di observasi dalam rangka untuk mengetahui sejauh manakah mau dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke MIN Pecabean. b) MIN Pecabean memiliki *Panca Prasetya* peserta didik, yaitu: (1) membiasakan dan melaksanakan peraturan dan tata tertib madrasah, (2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, (3) komitmen untuk menjangarkan dan prasarana Madrasah, (4) membina dalam dirinya untuk berperilaku dengan akhlakul karimah, (5) bekerja sama dan setia terhadap teman.

Panca prasetya peserta didik ini merupakan suatu sumpah setiasiswa MIN Pecabean untuk di amalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan madrasah maupun di masyarakat. 2) Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan: a) Proses pendidikan anti korupsi di MIN

Pecabean Tegal dimulai dengan adanya sosialisasi pada waktu upacara bendera setia pharise nindan pada acara rapat pembinaan dewan guru pada setia phari Rabu sore dan dengan cara budaya disiplin madrasah; b) Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada diri siswa MIN Pecabean yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab,

kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli; c) Model dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabeanadati yaitu: model terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan, pembiasaan nilai pada seluruh aktivitas dan suasana di madrasah; d) Strategi Pembiasaan yang dilaksanakan pada pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegalyaitu: penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara, pengadaan sosial kelas dan pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan; 3) Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegalyaitu: mengantar penilaian internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Sedangkan evaluasi pendidikan anti korupsi pada aspek kejujuran, disiplin, peduli, tanggung jawab, adil, sederhana, berani, kerjasama dan mandiri dilakukan dengan cara evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan anti korupsi dalam sertiap individu, juga dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas madrasah.

Kata Kunci: Pendidikan, anti korupsi dan madrasah ibtidaiyah.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Pujisyukurpenulispanjatkankepada Allah SWT atasterselesaikannyapenelitiandenganjudul “Pendidikan Anti Korupsi di MIN PecabeanKabupatenTegal”.

ShalawatdansalamsemogasenantiasatercurahkankepadajunjungkitaNabi Muhammad SAW, para sahabatdankeluarganya.

Laporanpenelitianini penulis susun sebagai wujud dari kinerja dan pertanggungjawaban penulis dalam melaksanakan salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi yakni penelitian, yang dimulai dari pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban terhadap hasil penelitian.

Alhamdulillah laporan penelitian ini dapat terselesaikan berkat kontribusi serta dorongan dan riherbagaipihak baik secara materi maupun moral. Oleh sebab itu penulis ucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

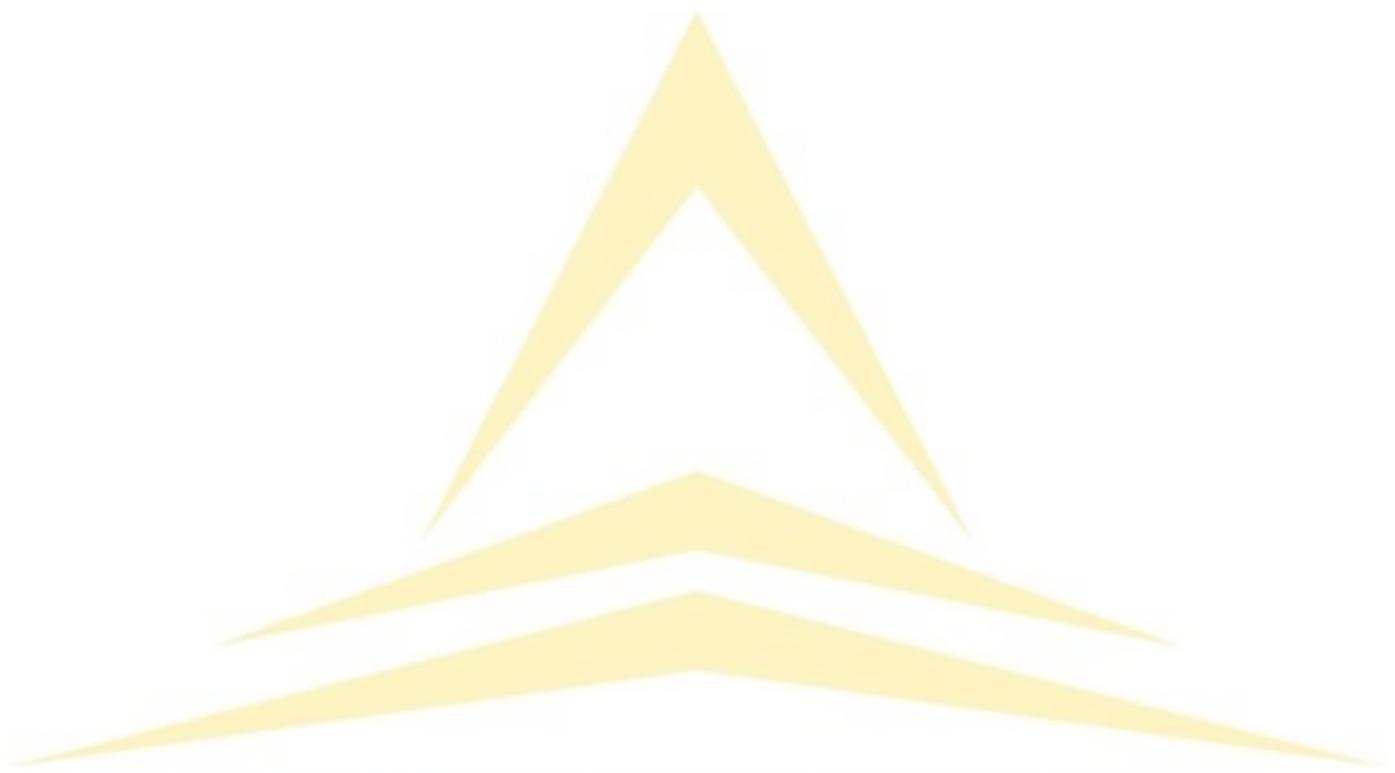
1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor IAIN Purwokerto
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Warek I IAIN Purwokerto
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I, Warek II IAIN Purwokerto
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Warek III IAIN Purwokerto
5. Drs. Amat Nuri, M.Pd.I., Ketua LPPM STAIN Purwokerto
6. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Purwokerto
7. Seluruh teman kerja, baik dosen dan karyawan IAIN Purwokerto.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang setimpal dan bernilai baik. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai perbaikan.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya umumnya.

Purwokerto, 26 Agustus 2016

Penulis,



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Sistematika Laporan.....	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Deskripsi Teori.....	12
1. Konsep Pendidikan.....	12
a. Pengertian Pendidikan.....	12
b. Tujuan Pendidikan	14
2. Konsep Korupsi dan Anti Korupsi.....	16
3. Konsep Pendidikan Anti Korupsi.....	18
a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi.....	18
b. Metode Pada Pendidikan Anti Korupsi.....	20
c. Model Pembelajaran Pada Pendidikan Anti Korupsi.....	25
d. Evaluasi Pada Pendidikan Anti Korupsi	25
4. Konsep Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.....	26
a. Pengertian Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.....	26

b. Tujuan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.....	27
c. Karakteristik Anak Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah....	29
B. Telaah Pustaka.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Setting Penelitian	34
C. Unit Analisis Penelitian.....	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	37
F. Keabsahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN	45
A. Deskripsi Data Penelitian.....	45
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
C. Rekomendasi.....	72
D. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi sekarang ini, Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan sistem politik, reformasi ekonomi, sampai reformasi birokrasi menjadi agenda utama di negeri ini. Yang paling populer adalah masalah reformasi birokrasi yang menyangkut masalah-masalah pegawai pemerintah yang dinilai korup. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya-budaya buruk birokrasi seperti praktik korupsi. Reformasi birokrasi ini pada umumnya diterjemahkan oleh instansi-instansi pemerintah sebagai perbaikan kembali sistem remunerasi (penggajian) pegawai. Namun pada kenyataannya, tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun sudah diberlakukan remunerasi gaji bagi pegawai pemerintah.

Korupsi yang terjadi di negeri ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Tindakan korupsi yang terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Hasil survei Transparency International pada Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi

Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. Sekarang Indonesia sama dengan Djibouti (negara di Afrika Timur), dan di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan kita setara dengan Vietnam dan Timor Leste. Kondisi seperti ini perlu disikapi dengan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah korupsi yang sudah mengakar, meluas, dan menggejala di Indonesia. Satu hal yang menarik untuk diingat adalah adanya sinyalemen yang mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah membudaya dan merusak karakter bangsa.

Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau *abuse of power* dalam skala besar. Hal itu bisa dilihat di DPR, Menteri, kepala daerah, dan pegawai kementerian. Ada yang mengatakan bahwa sistem sekarang ini memberikan kemungkinan adanya perbuatan korupsi. Penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran. Upaya pemberantasan korupsi perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan.

Sekolah merupakan lembaga yang diidolakan dengan lembaga yang bebas dari praktik korupsi. Harapan dibebankan ke dunia pendidikan untuk membangun sikap anti korupsi, membangun sikap amanah (*trust*). Tuntutannya, sistem pendidikan harus dibenahi agar dapat menjawab tantangan tersebut. Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan adaptasi individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ki Hajar Dewantara (1977: 14) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Mohammad Natsir (<http://www.csrc.or.id/>) dalam tulisannya Idiologi Didikan Islam, menyatakan pendidikan satu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dalam arti sesungguhnya.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 menyatakan, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UUSPN, 2003: 8). Dalam teori pendidikan terdapat tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, ranah kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi baru. Kedua, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Dari ketiga ranah pendidikan tersebut idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (kognitif) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Maka dari ketiga taksonomi tujuan pendidikan itu, idealnya harus dilakukan secara terpadu (integral) sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan akan jelas ke mana pendidikan itu akan diarahkan. Namun kenyataannya kecenderungan dan pencapaian tujuan pendidikan sudah jauh bergeser dari tujuan idealnya.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan kita terdiri atas tiga bagian, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat) (UUSPN, 2003: 13), yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Maka idealnya,

pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan, pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orang tua, pendidik (guru), dan masyarakat (<http://wiryana-holistic.blogspot.com/2016/01/problem-sosial-dan-tri-pusat-pendidikan.html>).

Dalam pendidikan keluarga, mengupayakan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya, menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua. Ayah maupun ibu harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal, khususnya yang menyangkut dengan uang. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam pendidikan anti korupsi. Kita harus dan berani membentuk sikap anti korupsi sejak dini dan dimulai dari pendidikan keluarga. Hal ini jelas merupakan tindakan yang patut dan harus didukung, sebab internalisasi sikap dan kebiasaan anti korupsi dapat saja lewat penegakan hukum maupun pendidikan yang bernilai preventif dan edukatif. Maka arah dari semua langkah itu adalah membangun kultur perlawanan terhadap budaya korupsi yang dimulai dari pendidikan keluarga, dengan sifat menciptakan efek jera, menebarkan budaya malu, menciptakan budaya kejujuran, budaya tanggung jawab dan berupaya untuk mencegah agar para calon pelaku korupsi takut untuk berbuat serupa.

Pendidikan di sekolah, mengembangkan pendidikan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) menjadi tugas dan tanggung jawab guru di sekolah. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991: 53), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada

tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang mantap, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'ala, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang hahal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga *moral action*. Kenapa, karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban (Azra, 2002), memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat.

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu harus ada kerja-kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi. Maka munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas

korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi. Karena, hakekat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta-didik yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupan bermasyarakat (Tilaar, 1999: 28).

Sistem pendidikan dibangun sebagai proses penyadaran potensi kejujuran, pendidikan hendaknya sebagai media penyadaran dari negara dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Sehingga memunculkan peserta didik dari proses penyadaran itu. Tapi janganlah menjadikan proses pendidikan sebagai media investasi dari peserta didik, apa lagi para penyelenggara pendidikan mendapatkan keuntungan finansial dari investasi peserta didik. Maka apabila sumber daya manusia yang lahir dari proses pendidikan seperti itu, setelah mendapatkan peluang kerja ia pun akan bekerja untuk mencari keuntungan demi mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan selama dalam proses pendidikan. Bahkan investasi yang ia telah keluarkan itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih. Jika sumber daya manusia itu tidak memiliki fondasi iman, akhlak, dan mental yang kuat, maka korupsi pun akan dilakukan, karena mengais atau mencari rezeki secara benar, halal, dan wajar untuk mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan dalam proses pendidikan tidak didapatkannya. Jika itu yang terjadi maka lahirlah manusia yang tidak amanah (*trust*), tidak dapat dipercaya dari product pendidikan yang mengkodisikannya seperti itu. Jika product pendidikan, rakyat dan atau masyarakat yang tidak amanah, sulit dipercaya, tidak jujur, negara akan hancur.

Untuk membrantas korupsi membutuhkan waktu beberapa generasi. Itu pun kalau ada program yang dilakukan secara konsisten. Korupsi sudah sedemikian "menggurita" dalam birokrasi negara dan telah membudaya dalam

kehidupan masyarakat. Paling dirugikan adalah rakyat banyak dan di antara lapisan masyarakat yang paling dirugikan adalah mereka yang jauh dari akses kekuasaan. Oleh sebab itu rakyat atau masyarakat berhak dan berkewajiban melakukan kontrol untuk menghentikan atau minimal menekan segala bentuk tindakan korupsi.

Apalagi dalam kehidupan politik kontemporer, korupsi tidak jarang dijadikan isu dan komoditas politik, sehingga korupsi dikonstruksi menjadi masalah politik, bukan lagi masalah hukum apalagi moral kejujuran. Dalam keadaan seperti ini, kesadaran politik tentang bahaya korupsi harus dibangkitkan dan dididik agar mempunyai ghirah memberantas korupsi. Upaya mendidik dan menyadarkan masyarakat ini penting, sebab masyarakat yang sadar jelas lebih baik daripada masyarakat yang apatis, yang tidak menyadari atau tidak tahu hak-haknya dan bersikap masa bodoh terhadap segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan pejabat publik atau siapa saja yang melakukan korupsi. Sebab sikap masa bodoh ini adalah lahan subur bagi tumbuhnya wabah korupsi dan dianggap sebagai perbuatan biasa saja. Oleh karena itu, upaya mendidik, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran mengenai krusialnya persoalan korupsi jelas merupakan sesuatu yang mendesak dilakukan. Karena warga masyarakat yang sadar dan memiliki pemahaman yang cukup tentang korupsi adalah landasan yang sangat penting bagi usaha menekan derasnya arus korupsi. Dengan demikian kuncinya adalah perlunya pendidikan anti-korupsi bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umumnya, agar "melek" terhadap korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan anti-korupsi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, mulai dari pendidikan informal keluarga dirumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal di masyarakat, dapat mencegah, mengurangi, dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan

pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan anti korupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur.

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan siswa. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anti korupsi telah dilakukan di berbagai negara, negara-negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia. Di dunia telah dibentuk juga jaringan kerjasama antar-negara untuk memperkenalkan program pendidikan anti korupsi. Salah satu contoh pendidikan anti korupsi di Cina, yakni melalui China *on-line*, seluruh siswa di seluruh pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi. Dalam jangka panjang generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi (Suyanto, 2005: 42).

Melalui pengembangan kultur sekolah, diharapkan siswa memiliki modal sosial untuk membiasakan berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi seyogyanya diberikan kepada anak-anak sejak di bangku sekolah dasar (SD/MI). Anak-anak SD/MI yang berusia antara 7 sampai dengan 12 tahun dapat berpikir transformasi *reversible* (dapat dipertukarkan) dan kekekalan (Disiree, 2008: 2). Mereka dapat mengerti adanya perpindahan benda, mampu mengklasifikasi dalam level konkrit, mampu memahami persoalan sebab akibat yang bersifat konkrit.

MIN Pecabean merupakan madrasah ibtidaiyah yang berada di desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Dalam pelaksanaan pendidikan di MIN Pecabean ini telah menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun pelajaran 2014/2015. Di antara program kerja MIN Pecabean yaitu peningkatan akhlak peserta didik. Oleh karenanya siswa MIN Pecabean sudah diperkenalkan suatu

tindakan dengan akibat yang baik dan yang tidak baik, termasuk pendidikan anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan kepada siswa MIN Pecabean, yakni: 1) Siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang anti korupsi. Untuk itu, perlu diperkenalkan terlebih dahulu nilai-nilai konkrit yang diyakini akan dapat melawan tindakan korupsi; 2) Kurangnya keteladanan dari lingkungan (orang tua, orang dewasa di sekitar dan media). Keteladanan dari orang-orang terdekat dan di sekitarnya akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari; 3) Adanya kompetisi yang kurang sehat antar-siswa. Upaya menghindari kompetisi yang kurang sehat dalam pergaulan di sekolah dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai budaya di sekolah, seperti saling menghargai, saling menghormati, kesederhanaan dan tidak pamer. Bahkan jika perlu sekolah dapat memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku terpuji; 4) Pembelajaran masih didominasi oleh aspek kognitif. Pembelajaran seperti ini kurang mampu membentuk karakter siswa. Untuk itu, perlu dikembangkan pembelajaran afektif yang bersifat aplikatif dengan model-model pembelajaran yang dikuasai guru, sehingga pembelajaran kognitif akan dapat dikawal untuk mewujudkan tujuan pendidikan di MIN Pecabean.

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “**Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimanakah pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?
2. Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?

3. Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Signifikansi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.
2. Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.
3. Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.

Sedangkan signifikansi yang diharapkan dari penelitian pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yaitu:

1. Dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah.
2. Dapat memberikan rujukan bagi lembaga anti korupsi dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi sejak dini.
3. Sebagai rujukan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah.
4. Dapat digunakan oleh para penanggungjawab pendidikan sebagai salah satu panduan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah terutama pada sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah.

D. Sistematika Laporan

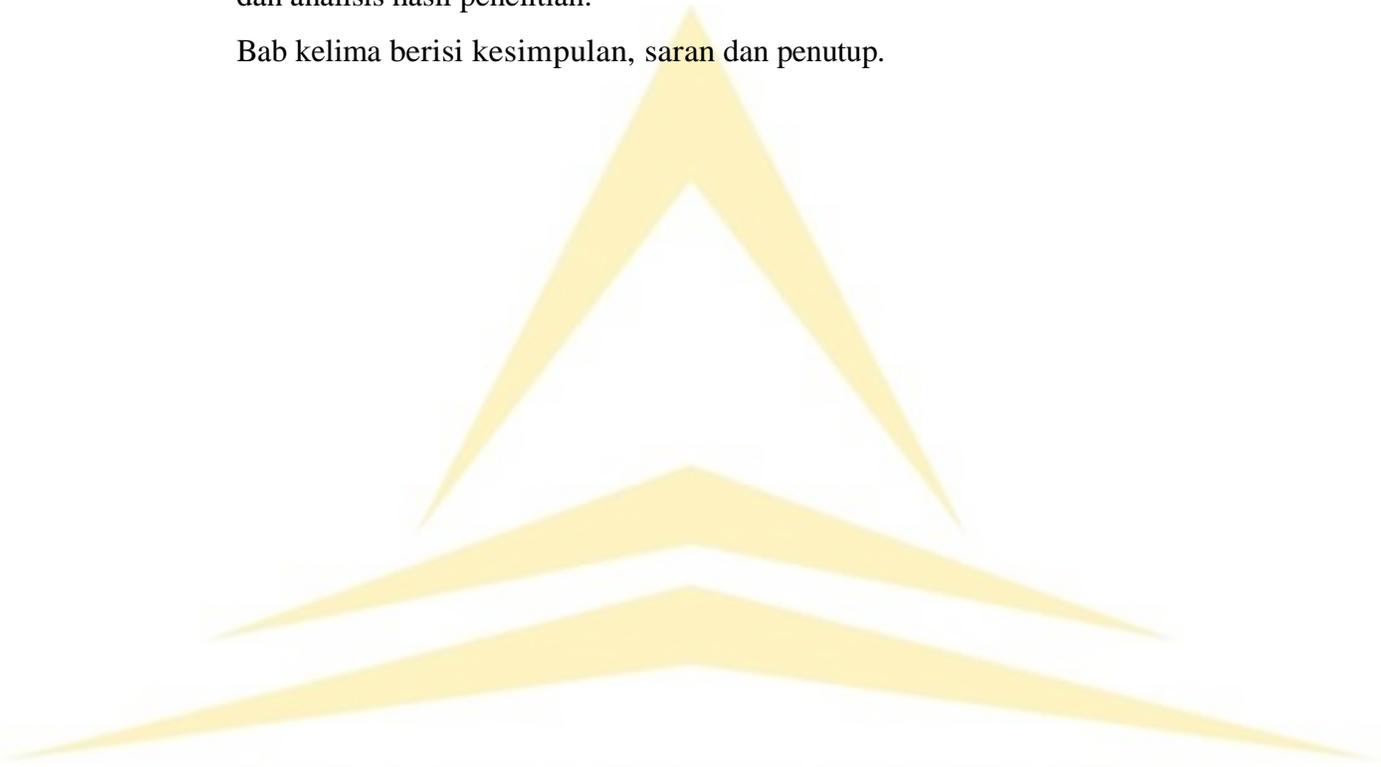
Langkah terakhir dalam seluruh proses penelitian adalah penyajian hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan sistematika penulisan yang merangkum keutuhan pembahasan. Untuk itu, uraian laporan sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah. Di samping itu dicantumkan pula tujuan dan signifikansi penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori/ kerangka teori, kajian pustaka, kerangka pikir serta pertanyaan penelitian.

Bab ketiga memuat metode penelitian yang berisi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan dan instrumen data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan temuan/hasil penelitian yang berisi tentang Pendidikan antikorupsi di MI MIN Pecabean Kabupaten Tegal, Pembahasan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran dan penutup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani *paedagogike*. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata *pais* yang berarti anak dan kata *ago* yang berarti aku membimbing. Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "paedagogos" (Soedomo A. Hadi, 2008: 17). Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak. Pendidikan secara terminologi, menurut M. J. Langeveld (Revrisond Baswir dkk, 2003: 108) yaitu: 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, *akil-baliq* dan bertanggung jawab. 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Tilaar (2002: 435) menyatakan bahwa "hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya". Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di

dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Emile Durkheim menyatakan, pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan oleh generasi dewasa pada generasi yang belum siap kehidupan sosialnya, tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, intelektual, dan moral sesuai dengan tuntutan masyarakat politik secara keseluruhan. *education is the influence exercised by adult generation on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both political society as a whole and the special milieu for which he is specifically destined.*(Jeanne H. Ballantine, 1983).

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup.

Senada dengan UU Sisdiknas tahun 2003, Muhammad Saroni (2011: 10) menyatakan bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.”

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

b. Tujuan Pendidikan

Dalam pelaksanaannya pendidikan tentu memiliki tujuan. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikannya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3). Menurut Herbison dan Myers (Panpan Achmad Fadjri, 2000: 36) “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikannya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3).

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011: 3) mengungkapkan bahwa *“for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”*. Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010: 271) bahwa *“melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”*. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Todaro and Smith (2003: 404) menyatakan bahwa *“pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.”* Jadi, pendidikan dapat

digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003: 1) bahwa: *Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.*

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dan sejahtera.

2. Konsep Korupsi dan Antikorupsi

Istilah korupsi berasal dari kata Latin “corruptus” atau Corruptio. Kata corruptus” yang semula berarti : to abuse (menyalah-gunakan“ atau “to deviate” (menyimpang). Dalam bahasa Belanda, korupsi berasal dari kata corruptie, yang turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan busuk, palsu, dan suap (KPK,206). Dalam perkembangan semantisnya, kata korupsi diartikan sesuai perspektif yang

dipergunakannya. Dalam dunia politik, korupsi sering diartikan sebagai “*abuse of public power*” untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Choirul Fuad Yusuf, 2010). Dari sisi moralitas atau humanitas, korupsi dikonotasikan sebagai *mode of conduct* yang menyimpang dari standar nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kemasyarakatan (Martiman Projohamidjoyo, 2009).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau kelompok tertentu (Martawiansyah: 2007). Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan asset negara. Pendidikan anti korupsi, dengan demikian, merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya dapat

menyumbang pada keberlangsungan Sistem Integrasi Nasional dan program antikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (Kesuma, 2004). Dalam pandangan Harmanto dan Suyanto (2005) materi pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah antara lain adalah: (1) apa dan di mana korupsi itu (2) isu moral, (3) korupsi dan hak asasi manusia, (4) memerangi korupsi, (5) korupsi dan ekonomi pasar, (6) korupsi dan hukum, (7) korupsi dan masyarakat demokrasi.

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah/madrasah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasikan dalam bentuk materi kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan melalui pengembangan budaya sekolah/madrasah.

3. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Wibowo (2013:38) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Yulita T.S (2010) menyatakan bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini (sportif, tanggung jawab, disiplin, jujur,

sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, peduli) kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif.

Pendidikan Anti Korupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Sistem pendidikan yang ikut memberantas korupsi adalah sistem pendidikan yang berangkat dari hal-hal sederhana (Supeno, 2009:239), seperti tidak mencontek, disiplin waktu, dan lain-lain.

Pendidikan diharapkan dapat menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. Untuk itu sejak dini anak perlu dibiasakan jujur, tidak menipu, dan tidak mengambil yang bukan haknya.

Menurut Nuh (dalam Wibowo, 2013:38) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sedangkan menurut Umar (dalam wibowo, 2013:38) menyatakan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter untuk tidak melakukan korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah

terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Hamalik (dalam Wibowo, 2013:126) menyatakan bahwa guru akan mampu mengemban dan melaksanakan tanggungjawabnya khususnya dalam internalisasi pendidikan anti korupsi jika memiliki berbagai kompetensi yang relevan. Misalnya guru harus menguasai cara belajar yang efektif, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, dan lain-lain.

Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat dua komponen penting, yaitu: (a) kemampuan penguasaan pengetahuan korupsi yang mencakup pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, penegakan dan pemberantasan korupsi, lembaga-lembaga anti korupsi, dan (b) kemampuan melaksanakan sikap anti korupsi misalnya tidak terlambat ke sekolah dan tidak mencontek.

b. Metode-metode pada Pendidikan Anti Korupsi

Dalam hal metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi, ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Elwina & Riyanto (dalam Yaramadani, Febri : 2012) menyarankan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebaiknya menggunakan cara atau metode yaitu sebagai berikut :

1) Metode demokratis

Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai

anti korupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini anak diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap anak diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini anak diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

2) Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentative untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, anak diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian anak akan aktif sejak dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan guru.

Selain menemukan nilai-nilai dari permasalahan yang diolah, anak juga diajak untuk secara kritis analitis mengolah sebab akibat dari permasalahan yang muncul tersebut. Anak diajak untuk tidak cepat menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan cermat dan hati-hati melihat duduk permasalahan untuk sampai pada pengambilan sikap. Anak diajak untuk melihat realita tidak hanya hitam-putih, tetapi lebih luas lagi yaitu adanya kemungkinan realita abu-abu.

3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan anak dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Anak membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong anak untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

4) Metode keteladanan

Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh anak bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada anak akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi anak. Dengan keteladanan guru dapat membimbing anak untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang anak, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku anak juga akan tidak benar. Dalam hal ini guru dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup.

Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun anak perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan (Sanjaya, 2006: 179). Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita tidak boleh korupsi; menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi atau mengapa kita harus jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

5) Metode *Live In*

Metode *Live in* dimaksudkan agar anak memiliki pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik.

Dengan cara ini anak diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama. Anak perlu mendapat bimbingan untuk merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara rasional intelektual maupun dari segi batin rohaninya. Hal ini perlu dijaga jangan sampai anak menanggapi pengalaman ini berlebihan, tetapi haruslah secara wajar dan seimbang.

6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang anak. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk *sharing* atau diskusi yang mendalam dan intensif.

Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa (Sanjaya, 2006: 282). Kelemahan yang sering terjadi dalam pembelajaran nilai atau sikap, (termasuk pembelajaran anti korupsi) adalah proses pembelajaran

dilakukan secara langsung oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru.

Pembelajaran anti korupsi pada prinsipnya adalah menggunakan metode yang melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Maka pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh metode pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi ini juga penting karena dengan cara penyampaian yang tidak tepat, tujuan yang akan dicapai juga sulit diperoleh. Supaya tujuan yang akan dicapai dapat diperoleh, dalam penyampaian nilai-nilai anti korupsi, harus digunakan cara-cara yang menarik dan disesuaikan dengan kemampuan anak didik.

IAIN PURWOKERTO

c. Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Azumardi Azra (2006: 54), bahwa diantara model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan antikorupsi yaitu *active learning* yang merupakan acuan dasar untuk proses pembelajaran pendidikan anti korupsi. Menurut Dikti (dalam Wibowo, 2013:54) ada beberapa model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak didik diantaranya adalah model pembelajaran berpusat pada siswa atau *student centered learning* (SCL). Kedua pendapat tersebut sama-sama memberi ruang lebih besar kepada peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Diharapkan dalam pembelajaran ini siswa dapat menangkap pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan baik. Untuk melaksanakan strategi tersebut, guru tidak perlu mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, akan tetapi guru merencanakan proses belajar mengajar agar siswa aktif tanya jawab, mengolah informasi yang telah didapat, mencari sumber informasi, serta menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar. Metode ini bisa digunakan dengan model yang variatif seperti *debate*, *problem based learning*, *ex change partner*, *games*, *role playing*, dan lain-lain.

d. Evaluasi Pada Pendidikan Anti Korupsi

Evaluasi yang dapat dilakukan pada pembelajaran pendidikan anti korupsi adalah test dan non test. Menurut Azra (2006:16) menyebutkan bahwa evaluasi yang dikembangkan dalam proses pendidikan anti korupsi terdiri dari dua macam, yaitu test dan non test (portofolio). Evaluasi dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay untuk menguji pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) terkait dengan sejumlah masalah korupsi.

Menurut Kemdiknas (dalam Wibowo, 2013:61) bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di

satuan pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian keberhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah yaitu, 1) menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati, 2) menyusun berbagai instrumen penelitian, 3) melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator, 4) melakukan analisis dan evaluasi, serta 5) melakukan tindak lanjut. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya (Wibowo, 2009:60) Jadi dapat disimpulkan bahwa guru dalam merumuskan evaluasi dapat berkreasi sendiri sesuai dengan karakteristik siswa dan pengintegrasian nilai-nilai yang ingin dikembangkan dan ditanamkan oleh guru kepada peserta didik.

4. Konsep Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

a. Pengertian Sekolah Dasar

Suharjo (2006: 1) menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.” Hal senada juga diungkapkan Fuad Ihsan (2008: 26) bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.” Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan Fuad Ihsan dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun.

Pernyataan tentang sekolah dasar lainnya yang dikemukakan oleh Harmon & Jones (2005: 1) bahwa: “*Elementary schools usually serve children between the ages of five and eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some elementary schools comprise kindergarten through fourth grade and are called primary schools. These schools are usually followed*

by a middle school, which includes fifth through eighth grades. Elementary schools can also range from kindergarten to eighth grade”.

Pernyataan oleh Harmon & Jones agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Suharjo yaitu terletak pada usia. Jika Suharjo menyatakan sekolah dasar lebih ditujukan pada anak yang berusia 6-12 tahun, maka Harmon dan Jones menyatakan sekolah dasar biasanya terdiri atas anak-anak antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai kelas enam. Kemungkinan perbedaan ini terletak pada fisik antara anak yang ada di Indonesia dan anak yang ada di negara Eropa dan sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam Undang-Undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun.

b. Tujuan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Sekolah memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah, anak belajar untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun

karakteristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan.“ *The school function as a socializing agent by providing the intellectual and social experiences from which children develop the skill, knowledge, interest, and attitudes that characterize them as individuals and that shape their abilities to perform adult roles*” (Berns, 2004: 212-213).

Bagi anak, ketika masuk ke sekolah dasar menandai suatu perubahan dimana peran-peran dan kewajiban baru akan dialami. “*For most children, entering the first grade signal a change a from being a “homechild” to being a “schoolchild” a situation in which new roles and obligations are experiences.* Santrock (2004: 355). Melalui sekolah dasar, pertama kalinya anak belajar untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalnya.

Suharjo (2006: 8) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut: 1) Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa; 2) Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa; 3) Membentuk warga negara yang baik; 4) Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP; 5) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat; 6) Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Tujuan pendidikan sekolah dasar lainnya dikemukakan oleh Eka Ihsanudin (2010) yaitu: (1) memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, (2) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya,(3) mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Jika dicermati, tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo dan Eka Ihsanudin memiliki kesamaan yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan

untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan sekolah dasar bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah.

c. Karakteristik Anak Sekolah Dasar

1) Perkembangan Fisik dan Kognitif

Masa sekolah dasar berlangsung antara usia 6 – 12 tahun. Masa ini sering disebut juga masa sekolah, yaitu masa matang untuk belajar atau sekolah. Pada masa ini anak-anak lebih mudah diarahkan, diberi tugas yang harus diselesaikan, dan cenderung mudah untuk belajar berbagai kebiasaan seperti makan, tidur, bangun, dan belajar pada waktu dan tempatnya dibandingkan dengan masa pra sekolah.

Dilihat dari karakteristik anak pertumbuhan fisik dan psikologisnya anak mengalami pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaannya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak berlangsung secara teratur dan terus menerus kearah kemajuan. “Anak SD merupakan anak dengan katagori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis baik mental maupun fisik” (Sugiyanto, 2010: 1). Pada fase ini pertumbuhan fisik anak tetap berlangsung. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, dan juga lebih banyak belajar berbagai keterampilan.

Jamaris (2006:19) menyatakan bahwa perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif, artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Setiap anak berkembang melalui tahapan perkembangan yang umum, tetapi pada saat yang sama setiap anak juga adalah makhluk individu dan unik. Pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat, tingkat perkembangan kognitif serta kematangan sosial dan emosional. Anak sekolah dasar berada dalam masa keemasan disepanjang rentang usia perkembangan manusia.

Montessori dalam Hainstock (1999: 109) menyatakan bahwa usia keemasan merupakan masa dimana anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya Montessori dalam Hainstock (1999:10-11) mengatakan bahwa masa ini merupakan periode sensitif (*sensitive periods*) yang ditandai dengan mudahnya anak menerima stimulus dari lingkungannya. Pada masa ini anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai lingkungannya. Pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya sehari-hari.

Vygotsky mengemukakan konsep *zone of proximal development* (ZPD) sebagai kapasitas potensial belajar anak yang dapat berwujud melalui bantuan orang dewasa atau orang yang lebih terampil. Stuyf mengatakan bahwa strategi pembelajaran pentahapan (*scaffolding*) memberikan bantuan secara individual berdasar ZPD masing-masing anak. Vygotsky dalam Stuyf memberi batasan tentang pembelajaran *scaffolding* sebagai tugas guru dan orang dewasa lainnya dalam membantu perkembangan anak dan menyediakan struktur bantuan untuk mencapai tahapan berikutnya, bantuan ini bersifat sementara (<http://condor.admin.ccnycuny.edu>).

Wolfgang dan Wolfgang (1992:14) mengatakan berkaitan dengan teori perkembangan, maka guru harus: (1) tanggap dengan proses yang terjadi dari dalam diri anak dan berusaha mengikuti arus perkembangan anak yang individual, (2) mengkreasikan lingkungan dengan materi luas yang beragam dan alat-alat yang memungkinkan anak belajar, (3) memperhatikan laju dan kecepatan belajar dari masing-masing anak, dan

(4) adanya bimbingan dari guru agar anak tertantang untuk melakukan sendiri.

Pada masa ini juga perkembangan kemampuan berpikir anak bergerak secara sekuensial dari berpikir konkrit ke berpikir abstrak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jean Piaget (Crain, 2004: 121-131) bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkrit. Pada tahap operasi konkrit ini anak sudah mengetahui simbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak. Dalam tahap ini anak mulai berkurang egosentrisnya dan lebih sosiosentris (mulai membentuk *peer group*). Akhirnya pada tahap operasi formal anak telah mempunyai pemikiran yang abstrak pada bentuk-bentuk yang lebih kompleks.

2) Hubungan Orang Tua dan Anak Sekolah Dasar

Santrock (2004: 349) menyatakan bahwa "*as children move into the middle and late childhood years, parents spend considerably less time with them*". Pada usia akhir, waktu anak-anak bersama keluarganya cenderung berkurang. Hal ini dikarenakan anak lebih banyak di sekolah dan atau bermain dengan teman-teman sebayanya yang banyak menyita waktu. Anak tidak lagi puas bermain sendirian di rumah, karena anak mempunyai keinginan kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok. Namun demikian, dalam hal penanaman norma sosial, kontrol, dan disiplin, orang tua masih memiliki peranan penting bagi anak.

Kontrol yang diberikan orang tua terhadap anak lebih berkaitan dengan memonitor perkembangan anak, mengarahkan dan member dukungan (*support*), pemanfaatan waktu secara efektif ketika mereka langsung berhubungan dengan anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga harus berusaha menanamkan kepada anak kemampuan untuk mengontrol perilaku mereka sendiri, untuk menghindari resiko cedera, untuk memahami perilaku yang diharapkan, dan merasakan perhatian ataupun

dukungan dari orang tuanya. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Fuad Ihsan (2008: 63-64) menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: (a) memelihara dan membesarkannya, (b) melindungi dan menjamin kesehatannya, (c) mendidik dengan berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, (d) membahagiakan anak dunia dan akhirat dengan memberikannya pendidikan anak. Dari pernyataan ini, dapat dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

3) Pendekatan Pembelajaran Berpusat pada Anak

Pendekatan yang berpusat pada anak (*child centered approach*) adalah suatu kegiatan belajar dimana terjadi interaksi dinamis antara guru dan anak atau antar anak. Menurut Coughlin (2000:5), pendekatan yang berpusat pada anak diarahkan: (1) agar anak mampu mewujudkan dan mengakibatkan perubahan, (2) agar anak menjadi pemikir yang kritis, (3) agar anak mampu membuat pilihan dalam hidupnya, (4) agar anak mampu menemukan dan menyelesaikan permasalahan secara konstruktif dan inovatif, (5) agar anak menjadi kreatif, imajinatif dan kaya gagasan, dan (6) agar anak memiliki perhatian pada masyarakat, negara dan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat Piaget, Erick Erickson dan Susan Isaac dalam Wolfgang dan Wolfgang (1992, 12-13) dijelaskan bahwa model berpusat pada anak sangatlah berbeda dengan model berpusat pada guru. Pada model yang berpusat pada anak pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan pada perkembangan (*developmental position*) dan kegiatan bermain (*play activity*), sedangkan pada model yang

berpusat pada guru pendekatannya berdasarkan perilaku dikondisikan (*behavioral position*) dan kegiatan pembelajaran yang diatur oleh guru (*direct instruction*).

B. Telaah Pustaka

1. Penelitian Abdun Nafi, *Pendidikan Anti Korupsi: Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Anti Korupsi* (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan (*education approach*), hal ini dimaksudkan bahwa harus ada upaya secara preventif untuk mencegah budaya laten korupsi yang ada di Indonesia, penelitian juga menemukan bahwa selama ini kurikulum PAI belum memuat materi-materi tentang nilai-nilai anti korupsi, kontekstualisasi pendidikan Islam juga harus segera dilakukan sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penelitian Nuriani Laura Malau Gurning, *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus* (Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa warung kejujuran efektif dipakai sebagai sarana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, hambatan dalam pelaksanaan warung kejujuran adalah masih adanya siswa yang melakukan kecurangan, pengelola warung kejujuran masih harus mengajar di kelas dan kadang muncul rasa jenuh. Usaha mengatasi dengan pemberian pengertian di kelas dalam pembelajaran anti korupsi dan sosialisasi ketika upacara bendera hari Senin, dan sesama guru saling menguatkan ketika mulai muncul rasa jenuh. Warung kejujuran berhasil membentuk karakter siswa yang jujur setidaknya selama mereka sekolah di SMP Keluarga, tapi para guru menyadari bahwa menanamkan nilai kejujuran pada siswa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu dekat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini menggunakan *starting point* penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan umumnya penelitian kualitatif lebih berorientasi pada teoritis (Moleong, 1997: 11). Dengan demikian, penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2005: 3).

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menuntut pemusatan perhatian kepada pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal secara intensif, terinci, dan mendalam. Jadi, penelitian ini adalah kualitatif naturalistik. Ada tiga karakteristik dalam penelitian ini. Karakteristik pertama, peneliti sebagai instrumen utama mendatangi sendiri secara langsung sumber datanya. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari fenomena yang tampak dan terjadi di lapangan. Karakteristik kedua, mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian lebih cenderung dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka, jadi hasil analisisnya berupa analisis kualitatif. Karakteristik ketiga, menjelaskan bahwa penelitian naturalistik lebih menaruh perhatian kepada sistematis proses yang terjadi, dan tidak semata-mata kepada hasil yang dicapai, segala aspek mendapat perhatian sepenuhnya dari peneliti, termasuk segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kejadian, misalnya terjadinya, perkembangannya, dan perubahannya.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.

Pemilihan lokasi ini menggunakan *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan indikator-indikator yang telah di buat oleh peneliti sehingga MI dibandingkan dengan MI yang lain di Kabupaten Tegal (Sugiyono, 2007: 124). MI yang memenuhi persyaratan, maka MI itulah yang di ambil sebagai tempat penelitian. Adapun MI yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu MIN Pecabean Kabupaten Tegal. Atas dasar pemikiran di atas, khususnya yang terkait dengan pendidikan Anti Korupsi di madrasah ibtidaiyah.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian pendahuluan dilaksanakan pada semester kedua tahun pelajaran 2015/2016 pada bulan Januari 2016. Sedangkan penelitian lanjutan dilaksanakan pada semester dua tahun pelajaran 2015/2016 pada 1 Mei – 31 Juli 2016. Lama penelitian secara efektif berlangsung sekitar 3 bulan.

C. Unit Analisis

Dalam penetapan subjek penelitian atau responden sebagai informan, dipilih sebagai subyek pertama adalah informan kunci yaitu informan yang berdasarkan pertimbangan tertentu memenuhi syarat sebagai informan yang sangat mengetahui tentang aspek-aspek permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini yang dianggap memenuhi syarat informan pada MIN Pecabean Kabupaten Tegal adalah kepala MIN Pecabean, selanjutnya Dewan guru, staf administrasi dan siswa. Khusus dalam penetapan siswa sebagai responden akan memperhatikan pemerataan kelas, jenis kelamin, dan jenis kasus khusus yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. maka dalam penentuan subyek penelitian diambil secara '*purposive sampling*'. Sesuai dengan pendapat Nasution (2008: 32) disebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dipilih secara '*purposive*' berkaitan dengan purpose atau tujuan penelitian. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sering sampel berupa responden yang dapat diwawancarai, kemudian responden tersebut dimintai untuk

menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian responden ini diminta pula menunjuk orang lain, dan seterusnya. Untuk memperoleh informasi tertentu sampling dapat diteruskan sampai dicapai taraf 'redudancy', ketuntasan atau kejenuhan, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Teknik informan yang ditetapkan secara berkelanjutan tersebut biasanya disebut dengan *snowball sampling technique*, yaitu teknik pemilihan informan yang diawali dari jumlah kecil, kemudian atas dasar rekomendasinya menjadi semakin membesar sampai pada jumlah yang diinginkan. Selanjutnya di dalam penentuan seberapa banyak informan yang akan diambil dalam penelitian ini tidak dibatasi.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka dalam penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan mempertimbangkan kesiapan responden, dan situasi yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia dan keterbatasan kemampuan maka lokasinya telah ditetapkan di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.

Adapun subyek penelitian adalah Kepala MIN Pecabean, dewan guru, staff administrasi serta siswa MIN Pecabean Kabupaten Tegal dan obyek penelitiannya mengenai pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, peneliti dapat menetapkan tingkat kelengkapan dan kedalaman informasi sejalan dengan fokus penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang, tempat, dan simbol, yang oleh Suharsimi Arikunto (2007: 114-115) disebut dengan tiga p, yaitu person, place, dan paper. Orang "person" adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Tempat "place" adalah sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak, yang keduanya merupakan obyek dari penggunaan metode observasi. Sedangkan kertas "paper" adalah sumber data

yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol lainnya, yang semuanya cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Sumber data dari unsur person atau pelaku pendidikan terdiri atas guru dan siswa, sedangkan sumber data dari unsur place dan paper terdiri atas sarana prasarana, dokumen-dokumen, situasi, aktivitas, dan lain-lain.

Berdasarkan sumber data tersebut, maka jenis data yang dihimpun dari pelaku dalam penelitian ini berupa kata-kata, perbuatan, dan pikiran mereka, sedangkan jenis data dari non pelaku berupa data tertulis, situasi, aktivitas, benda-benda, dan lain sebagainya.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu bagian penelitian yang sangat penting. Keberhasilan suatu penelitian kualitatif naturalistik sangat tergantung kepada sikap yang dikembangkan peneliti yaitu: teliti, intensif, terinci, mendalam, dan lengkap dalam mencatat setiap informasi yang ditemukan. Untuk merefleksikan sikap peneliti tersebut, digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1) Observasi

Dalam penelitian ini, observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya), sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Dengan menggunakan teknik observasi non partisipan (tidak terlibat) secara langsung peneliti dapat memperoleh data tentang kondisi objektif MIN Pecabean Kabupaten Tegal, terutama keadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan proses pembelajaran, aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah.

2) Wawancara

Untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang pendidikan anti korupsi, peneliti berkomunikasi langsung dengan responden melalui

wawancara. Peneliti berusaha mengetahui bagaimana responden memandang dunia dari segi perspektifnya, pikirannya, dan perasaannya.

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang terfokus dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, akan tetapi berpusat kepada satu masalah tertentu, yang dilakukan secara bebas dari satu masalah ke masalah lain, sepanjang berkaitan dengan aspek-aspek masalah yang diteliti.

3) Studi Dokumentasi

Yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang diteliti berupa catatan, transkrip, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam studi dokumentasi ini yang ditelaah adalah data dan informasi tertulis. Dokumen yang diteliti antara lain pedoman, juknis, surat-surat keputusan seluruh program yang dipedomani, beragam administrasi KBM guru, data personalia, data presensi, dan data prestasi siswa.

Sedangkan instrumen utama adalah peneliti sendiri, selanjutnya untuk mempertajam dan melengkapi data penelitian digunakan lembar pengamatan, panduan wawancara dan catatan lapangan. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang profil masing-masing sekolah. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat peristiwa, kejadian, gejala atau fenomena yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean. Sedangkan panduan wawancara digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data atau informasi/keterangan tentang berbagai hal yang membutuhkan pernyataan, pendapat, penegasan atau penjelasan lebih lanjut dari subjek penelitian. Jadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berfungsi menetapkan fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Sugiyono (2009: 305) menjelaskan bahwa peneliti sebagai instrumen perlu divalidasi yang meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Denzin dan Lincoln (2009: 271) mengatakan bahwa triangulasi data (*data triangulation*) adalah menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Pedoman wawancara untuk kepala MIN, dewan guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data untuk triangulasi, dilakukan dengan cara studi lapangan, observasi, wawancara dan kajian dokumentasi. Instrumen yang digunakan sangat tergantung pada jenis data yang dibutuhkan yaitu data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebagaimana yang telah disebutkan dalam subyek penelitian di atas. Sumber datanya berupa perkataan atau perbuatan dari informan yang mengarah pada fokus penelitian. Di samping itu peneliti juga menggunakan sumber data tertulis seperti buku yang memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, termasuk arsip-arsip, foto-foto, dan sebagainya.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif (Nasution, 2008: 34) ialah peneliti itu sendiri. Pada awal penelitian, penelitalah alat satu-satunya. Ada kemungkinan hanya peneliti itu sendirilah yang merupakan alat sampai akhir penelitian. Namun setelah penelitian berlangsung selama waktu tertentu, diperoleh fokus yang jelas, maka ada kemungkinan untuk mengadakan angket dan wawancara yang lebih terstruktur untuk memperoleh data yang lebih spesifik. Angket yang lebih terstruktur dapat pula digunakan untuk men-check kebenaran data, asal saja sudah '*grounded*'. Meskipun demikian, khusus dalam penelitian ini penulis menyiapkan suatu instrumen penelitian dalam bentuk angket yang terstruktur sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian setelah di lapangan, jika dikemudian hari ternyata memang harus segera diperlukan.

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan, atau alat perekam. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini khususnya dalam membuat catatan adalah harus dapat dibedakannya antara data deskriptif dengan data hasil penafsiran peneliti. Di dalam proses pengumpulan data agar mendapatkan data yang akurat terlebih dahulu perlu digunakan strategi. Strategi yang digunakan biasanya disebut dengan penentuan setting penelitian.

Selanjutnya strategi yang digunakan dalam penentuan setting penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pendekatan secara informal ke MIN Pecabean Kabupaten Tegal, untuk menemui kepala MIN Pecabean, dewan guru, dan staf administrasi, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan melaksanakan penelitian di MIN Pecabean khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan antikorupsi. Tahap berikutnya adalah melakukan pendekatan secara formal. Disini peneliti terlebih dahulu menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menindaklanjuti dari kedatangan terdahulu yang dilakukan secara informal. Dalam pendekatan secara formal ini peneliti sudah menyiapkan surat-surat ijin resmi, sehingga betul-betul dapat diterima dan tidak dicurigai macam-macam oleh pihak lembaga sekolah. Setelah menyampaikan ijin secara formal ini, peneliti sudah mulai melakukan pendekatan dengan responden yang akan dijadikan informan, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kepala MIN Pecabean.
2. Peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan proses pembelajaran di sekolah khususnya dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan antikorupsi, baik di dalam ruang kelas, maupun kegiatan di luar kelas, termasuk kegiatan diskusi dan ceramah agama. Diusahakan peneliti mengikutinya mulai dari jam masuk sekolah sampai berakhirnya semua aktivitas sekolah dalam setiap harinya. Untuk mendalami masalah penelitian agar diperoleh hasil maksimal sehingga dapat mengungkapkan

hasil sesuai dengan tujuan penelitian maka diperlukan waktu yang relatif lama. Namun sekiranya dalam waktu sekitar tiga bulan telah dianggap cukup untuk menyerap informasi yang tersedia, maka untuk sementara dianggap selesai. Jika dikemudian hari ternyata masih ada data yang diperlukan dan bersifat prinsipiel, peneliti dapat berkunjung kembali ke sekolah tersebut untuk melengkapinya. Setelah dianggap tuntas semuanya baru kemudian meminta surat rekomendasi dari kepala sekolah, bahwa kegiatan penelitian di MIN Pecabean telah dilaksanakan, dan bagi si peneliti digunakan sebagai bukti bahwa proses pelaksanaan penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

F. Keabsahan Data

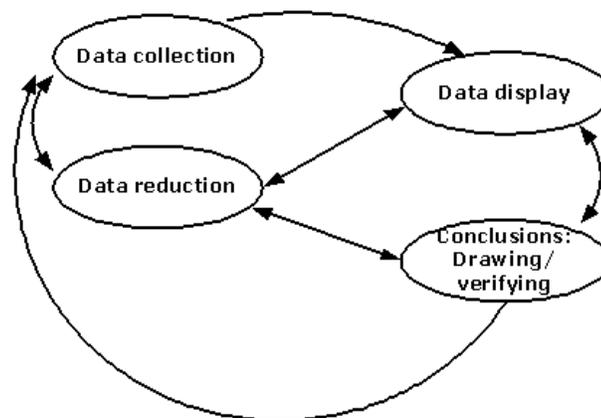
Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik dan kriteria dengan menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi metode dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan cara yang berbeda misalnya wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Melalui teknik ini, dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang relatif sama atau tidak pada waktu yang berbeda. Bila nara sumber memberikan data yang relatif sama, berarti data yang diperoleh telah kredibel. Data yang diperoleh dalam penelitian ini data pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean. Data dari sumber-sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan. Selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut. Untuk memperoleh keabsahan data maka dalam penelitian ini digunakan proses validasi data melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Triangulasi

merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengadakan *check and recheck* dari berbagai sudut pandang.

Mengadakan perpanjangan pengamatan penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang tidak dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people* (Susan Stainback, 1988 dalam Sugiyono). Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau salah, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan di akhiri.

G. Analisis Data

Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berkelanjutan, yaitu di kala penelitian sedang berlangsung analisis telah dimulai, dan pada saat seluruh data telah terkumpul, analisis yang lebih halus dapat dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif *Miles and Huberman* (1984), alur analisisnya seperti gambar berikut ini:



Gambar 1
 Alur Analisis Data Kualitatif Berdasarkan “Model Interaktif”
 (Sumber: Miles, M. B. & Huberman, A. M, 1984)

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti/pokok, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian ini dengan cara menyajikan data inti/pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, tanpa mengabaikan data-data pendukung, yaitu mencakup proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan.

Data yang terkumpul demikian banyak dan kompleks, serta masih tercampur aduk, kemudian direduksi. Reduksi data merupakan aktivitas memilih data. Data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean. Data yang tidak terkait dengan permasalahan tidak disajikan dalam bentuk laporan.

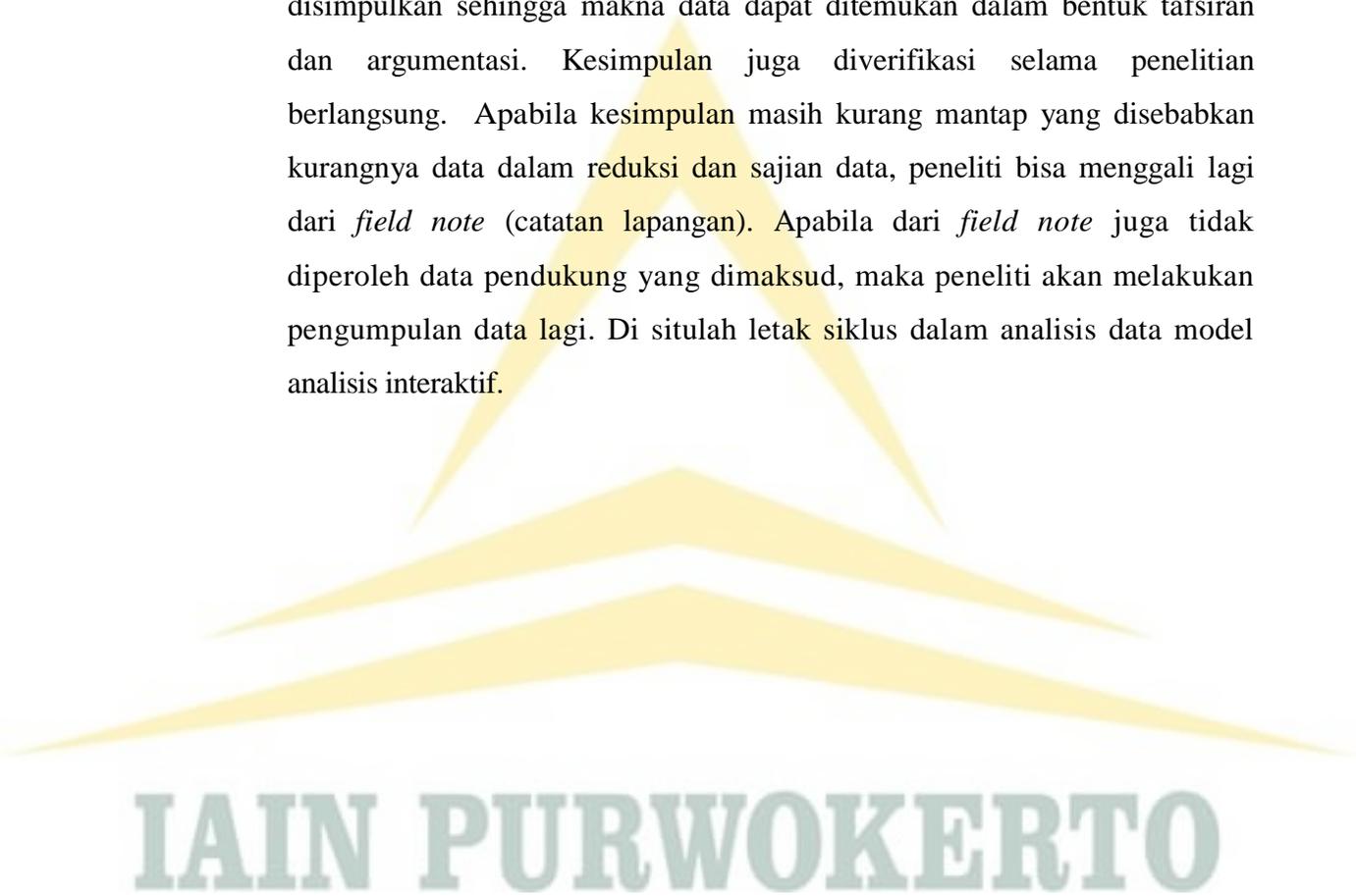
2) Display Data

Supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya

adalah untuk memudahkan dalam mendiskripsikan suatu peristiwa, sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan.

3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi, data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Apabila kesimpulan masih kurang mantap yang disebabkan kurangnya data dalam reduksi dan sajian data, peneliti bisa menggali lagi dari *field note* (catatan lapangan). Apabila dari *field note* juga tidak diperoleh data pendukung yang dimaksud, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data lagi. Di situlah letak siklus dalam analisis data model analisis interaktif.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean berada di jalan Purwitasari desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. MIN Pecabean berdiri tahun 1986 dan berdasarkan SK Dirjen Mapenda Departemen Agama Republik Indonesia No. 244/10/1993, tanggal 25 Oktober 1993 tentang penegerian MI Pecabean, dengan NSM: 111332809099 dan dengan status madrasah terakreditasi A (Hasil wawancara dengan Kepala MIN Pecabean tanggal 6 Mei 2016).

Visi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean yaitu Terwujudnya Madrasah Ibtidaiyah yang Islami, Unggul dan Berkarakter. Sedangkan misinya yaitu: 1) menanamkan nilai-nilai ke-Islaman di Madrasah; 2) meningkatkan prestasi akademis dan non akademis; 3) Mengembangkan nilai budaya karakter; 4) Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara optimal; 5) Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean yaitu: a) mendidik siswa menjadi pribadi muslim yang siap menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan keberhasilan dan kemenangan; b) untuk melatih mensuasakan serta membekali para siswa-siswi dengan kelurusan aqidah, kemuliaan akhlaq, rajin beribadah, senang membantu orang tua, senang membantu orang lain, memegang teguh nilai kebenaran, mencintai kelestarian lingkungan, giat bekerja dan belajar, serta optimisme dalam hidup; c) menyiapkan peserta didik menjadi generasi muslim yang utuh yakni generasi yang senantiasa memadukan antara iman, ilmu dan amal yang nyata dan mulia dalam seluruh aspek kehidupan sebagai perwujudan hamba Allah yang sekaligus kholifah-Nya di muka bumi (Dokumentasi MIN Pecabean Kab. Tegal).

Pada tahun pelajaran 2015/2016 jumlah seluruh siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean dari kelas I – kelas VI yaitu 334 siswa. Berikut ini data siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean:

Tabel 1.

Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean

Kelas	Jumlah Siswa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	26	25	51
II	26	29	55
III	25	24	49
IV	30	43	73
V	29	23	52
VI	22	32	54
Jumlah Total			334

(Sumber: Dokumentasi MIN Pecabean)

Sedangkan jumlah sumber daya manusia Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean berjumlah 23 orang dengan status 18 orang guru PNS dan 5 orang guru tidak tetap (GTT) serta 3 orang karyawan. Berikut ini data guru dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean:

Tabel 2.

Data Guru dan Karyawan MIN Pecabean

No	Nama/NIP	Jabatan Guru	Pangkat Gol/ Ruang	Jenis Guru	L/ P
1	H.Shofar Sholahudin, S.Ag., M.Pd NIP. 19700413 199603 1 001	Guru madya	Pembina/ IV/b	Kepala	L
2	Nurningsih, S.Pd NIP. 19651109 199403 2 001	Guru Madya	Pembina/ IV/a	Guru Kelas	P

3	Hj.Alifah Zaroroh, S.Pd.I NIP.19620821 199803 2 001	Guru Muda	Penata Tk.I/ III/d	Guru Mapel	P
4	Hj.Hindun Indrayanti, S.Pd.I NIP. 19730126 199703 2 001	Guru Muda	Penata Tk.I/ III/d	Guru Kelas IIIA	P
5	Endang Trisno, S.Pd NIP.19680401 200501 1 001	Guru Muda	Penata/ III/c	Guru Penjas Orkes	L
6	Mundiroh, S.Ag NIP. 19740112 200701 2 019	Guru Pertama	Penata Md Tk.I /III/b	Guru Mapel	P
7	Edy Susiyanto, S.Sos. NIP. 19670502 200701 1 048	Guru Pertama	Penata Md Tk.I /III/b	Guru Mapel	L
8	Asep Hermansyah, S.Pd.I NIP. 19781222 200501 1 003	Guru Pertama	Penata /III/c	Guru Kelas IVB	L
9	Drs. Sugiarto NIP. 19680401 200501 1 001	Guru Muda	Penata Tk.I/ III/d	Guru Kelas VB	L
10	Budi Santoso, S.Pd.I NIP. 19771202 200501 1 003	Guru Muda	Penata /III/c	Guru Kelas VIB	L
11	Mustoni, S.Pd.I NIP. 19780830 200701 1 013	Guru Pertama	Penata Muda/ III/b	Guru Mapel	L
12	Hj.Dian Sulistyaningsih, S.Pd	Guru	Penata	Guru	P

	NIP. 19650919 200501 2 000	Pertama	Muda/ III/b	Kelas IVA	
13	Supriyatin,S. Pd.I NIP. 19720515 200701 2 036	Guru	Penata	Guru Kelas IA	P
		Pertama	Muda/ III/a		
14	Siti Maftukha, S.Pd.I NIP. 19760507 200710 2 006	Guru	Penata	Guru Kelas IB	P
		Pertama	Muda/ III/b		
15	Umi Azizah, S.Pd.I NIP. 19830804 200710 2 003	Guru	Penata	Guru Kelas	P
		Pertama	Muda/ III/b	VA	
16	Siti Usni, S.Pd.I NIP. 19790115 201101 2 005	Guru	Penata	Guru Mapel	P
		Pertama	Muda/ III/a		
17	Sukron Ma'mun, S.Pd NIP. 19810929 201101 1 004	Guru	Penata	Guru BK	L
		Pertama	Muda/ III/a		
18	Nurkhamimah, S.Pd.I NIP. 19700324 200604 2 007	Guru	Penata	Guru Mapel	P
		Pertama	Muda/ III/a		
19	Luthfi Muntaqo, S.Pd NIP.-	GTT	-	Guru Kelas IIIB	L
20	Murniyati, S.Pd.I NIP.-	GTT	-	Guru Kelas IVA	P
21	Any Nurfahmiaty, S.Pd.I	GTT	-	Guru Kelas	P

				IIA
22	Wiwin Setiawan	GTT	-	Guru L
				Mapel
23	Indah Izzati	GTT	-	Guru P
				Mapel

(Sumber: Dokumentasi MIN Pecabean)

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

MIN Pecabean merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah negeri dari 3 MIN yang berada di Kabupaten Tegal. MIN Pecabean memiliki visi terwujudnya madrasah ibtidaiyah yang Islami, unggul dan berkarakter. Sedangkan misinya: 1) menanamkan nilai-nilai ke-Islaman di Madrasah; 2) meningkatkan prestasi akademis dan non akademis; 3) Mengembangkan nilai budaya karakter; 4) Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara optimal; 5) Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pecabean yaitu: a) mendidik siswa menjadi pribadi muslim yang siap menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan keberhasilan dan kemenangan; b) untuk melatih mensuasanakan serta membekali para siswa-siswi dengan kelurusan aqidah, kemuliaan akhlaq, rajin beribadah, senang membantu orang tua, senang membantu orang lain, memegang teguh nilai kebenaran, mencintai kelestarian lingkungan, giat bekerja dan belajar, serta optimisme dalam hidup; c) menyiapkan peserta didik menjadi generasi muslim yang utuh yakni generasi yang senantiasa memadukan antara iman, ilmu dan amal yang nyata dan mulia dalam seluruh aspek kehidupan sebagai perwujudan hamba Allah yang sekaligus kholifah-Nya di muka bumi. (wawancara dengan Kepala MIN Pecabean, tanggal 4 Juni 2016).

Pada MIN Pecabean juga memiliki *Panca Prasetya* peserta didik, yaitu 1) membiasakan dan melaksanakan peraturan dan tata tertib madrasah, 2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, 3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, 4) membina dalam dirinya untuk berperilaku akhlakul karimah, 5) bekerja sama dan setia terhadap teman. Dalam system rekrutmen siswa baru, calon siswa yang daftar di MIN Pecabean berasal dari latar belakang sosial ekonomi, kecerdasan, agama, budaya, etnik maupun ras yang heterogen, mereka dapat diterima menjadi siswa MIN Pecabean sepanjang lulus wawancara dan belum terpenuhinya kuota, sebab dalam merekrut siswa baru diterapkan system kuota 2 kelas, setiap kelas maksimal 28 siswa sehingga setiap angkatan hanya menerima siswa maksimal 56 siswa (wawancara dengan Kepala MIN Pecabean tanggal 4 Juni 2016).

Calon siswa yang mendaftarkan diri di MIN Pecabean ini kemudian di seleksi dengan wawancara, akan tetapi wawancara ini bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya calon siswa akan tetapi seleksi ini di gunakan untuk mengetahui motivasi yang dimiliki oleh calon siswa apakah benar-benar memiliki kemauan dan motivasi yang kuat untuk menjadi siswa di MIN ini. Berdasarkan seleksi dengan cara wawancara ini maka sudah dapat dipastikan calon siswa yang diterima. Di samping seleksi, ada wawancara dan observasi yang dilakukan pihak sekolah dengan orang tua/ wali siswa, wawancara dan observasi ini digunakan dalam rangka untuk mengetahui motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di MIN Pecabean. (wawancara dengan Kepala MIN Pecabean tanggal 4 Juni 2016).

2. Proses Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal dimulai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kepala MIN Pecabean terhadap dewan guru, staff administrasi dan siswa dalam upacara bendera setiap hari senin. Sosialisasi juga dilakukan setiap hari rabu sore pada acara rapat pembinaan dewan guru dalam rangka untuk *sharring* problematika yang terjadi selama

seminggu kemudian dari hasil rapat ini dapat ditemukan solusi-solusi dari pada permasalahan-permasalahan yang ada di MIN Pecabean. Di samping itu proses pendidikan anti korupsi dilakukan dengan dengan cara budaya disiplin sekolah, di MIN Pecabean ini siswa masuk kelas pukul 06.30 WIB, diawali dengan tadarus Al Quran selama 30 menit, kemudian pada pukul 07.00 WIB dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya, pelajaran berakhir pada pukul 12.25 WIB. Setelah pelajaran berakhir ada program baca tulis Al Quran dan Tahfidz Quran, yang berakhir pukul 13.00 WIB. Program ini mempunyai target siswa lulus dari MIN Pecabean ini hafal 2 Juz Al Quran (Hasil Wawancara dengan Kepala MIN Pecabean tanggal 6 Juni 2016).

Menurut Drs. Sugiarto (Wawancara tanggal 6 Juli 2016), bahwa Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa MIN Pecabean. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Dalam memaknai pendidikan anti korupsi, tentu tidak lepas dari sebuah nilai yang ada di dalamnya. Berikut merupakan nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada diri siswa MIN Pecabean:

No	Nilai	Indikator
1.	Jujur	- Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten), - Tidak melakukan perbuatan curang, - Tidak berbohong,

- Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
- 2. Disiplin Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan di MIN Pecabean
- 3. Tanggungjawab Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
- 4. Kerja Keras
 - Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,
 - Terhindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
- 5. Sederhana Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak riya
- 6. Mandiri
 - Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain,
 - Tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
- 7. Adil
 - Selalu menghargai perbedaan,
 - Tidak pilih kasih terhadap teman
- 8. Berani
 - Berani jujur,
 - Berani menolak ajakan untuk berbuat curang,
 - Berani melaporkan adanya kecurangan,
 - Berani mengakui kesalahan
- 9. Peduli
 - Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku,
 - Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung

jawab

(Sumber: Dokumentasi MIN Pecabean)

Menurut H. Shofar Sholahudin, S.Ag., M.Pd selaku Kepala MIN Pecabean (wawancara dengan Kepala MIN Pecabean, tanggal 4 Juli 2016), bahwa “Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, maka model dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabean ada tiga yaitu: model terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan, pembiasaan nilai pada seluruh aktifitas dan suasana di madrasah. Deskripsi dari pelaksanaan ketiga model dan pendekatan pendidikan anti korupsi di MIN pecabean sebagai berikut:

1) Model Terintegrasi dalam Mata pelajaran.

Menurut H. Shofar Sholahudin, S.ag., M.Pd selaku kepala MIN Pecabean Tegal menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara terintegrasi dengan mata pelajaran dan bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Pada prinsipnya model integrasi dalam semua mata pelajaran bisa dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar. Integrasi melalui pengembangan materi terutama dilakukan terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan yang memang sebagian materinya mengandung muatan nilai dan perilaku Anti Korupsi. Sedangkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pengintegrasian lebih diutamakan melalui pengembangan metode, media, dan sumber belajar. Integrasi melalui pengembangan metode, media, dan sumber belajar juga harus dilakukan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan. Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti

korupsi tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa yang ada pada setiap jenjang madrasah.

Integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Anti korupsi, seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan sebagainya. Beberapa metode seperti diskusi, bermain peran, demonstrasi, simulasi, curah pendapat, dan sebagainya perlu didesain dengan skenario yang dapat mendorong terjadinya proses internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Anti korupsi tertentu. Integrasi melalui media dan sumber belajar dengan memilih penggunaan media dan sumber belajar yang mengandung muatan nilai dan perilaku Anti Korupsi tertentu dilakukan baik untuk materi pembelajaran yang secara langsung mengandung muatan nilai dan perilaku Anti Korupsi dimaksud maupun tidak. Beberapa media dan sumber belajar tersebut diantaranya adalah gambar, foto, video, berita media massa, puisi, sajak, cerpen, prosa, pantun, dan sejenisnya yang berkaitan dengan korupsi (Hasil wawancara dengan Kepala MIN Pecabean, tanggal 6 Juni 2016).

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali dan semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri peserta didik tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran. Namun, pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang

akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik. Dalam setiap awal pembelajaran guru selalu menyisipkan materi-materi anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adil, mandiri, peduli dan sederhana. Dengan cara memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan materi pelajaran yang sedang disampaikan. Misalnya pentingnya masalah kejujuran, bahwa kejujuran itu sangat penting bagi seseorang sebab tanpa kejujuran orang akan mudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, contohnya banyak para pejabat, kepala daerah dan anggota DPR yang masuk penjara gara-gara tidak jujur, mereka itu bukan orang bodoh, mereka semua itu orang pandai namun karena tidak jujur mereka masuk penjara. (Hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso, S.Pd.I., Wali Kelas VI/b MIN Pecabean tanggal 14 Juli 2016).

Pada mata pelajaran olah raga khususnya praktek sepak bola, bola volley, tenis meja dan lainnya banyak sekali pendidikan anti korupsi yang secara tidak sengaja di tanamkan kepada peserta didik, misalnya sportifitas yang berkaitan dengan kejujuran, setiap pertandingan apapun baik itu sepak bola, bola volley, tenis meja, maupun pertandingan apapun peserta didik ditanamkan nilai-nilai sportifitas, adil, dan mandiri. Dengan menyisipkan materi-materi pendidikan anti korupsi pada pertandingan yang ada di olah raga, peserta didik secara otomatis dapat menjadikan peserta didik memiliki perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Hasil wawancara dengan Bapak Endang Tresno, S.Pd., guru Olah Raga, tanggal 14 Juli 2016).

2) Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.

Model pendidikan Anti Korupsi di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mendorong terjadinya

internasionalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Anti Korupsi melalui aktivitas dan pengalaman nyata siswa. Pada prinsipnya semua kegiatan kesiswaan secara instrinsik mengandung muatan nilai dan perilaku Anti Korupsi dengan kadar yang berbeda. Namun harus dikembangkan secara sengaja dan terencana sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara efektif. Kegiatan kesiswaan yang dimaksud baik kegiatan kesiswaan yang selama ini sudah ada baik yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Penanaman nilai anti korupsi di MIN Pecabean dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Kegiatan Insidental yang dilaksanakan di MIN Pecabean yakni PHBI (peringatan hari besar Islam) dan PHBN (peringatan hari besar nasional). Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya, dengan model ini peserta didik sungguh mendapat nilai melalui pengalaman – pengalaman konkrit. Pengalaman akan lebih tertanam dalam diri peserta didik jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog. Peserta didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggembirakan. Namun belum ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di madrasah dan membutuhkan waktu lebih banyak. Model ini menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama.

Adapun Kegiatan ekstrakurikuler di MIN Pecabean meliputi: ekstrakurikuler Calung, Pramuka, dan ekstrakurikuler tahfidz Quran. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap seminggu sekali kecuali ekstrakurikuler tahfidz Quran, sebab ekstrakurikuler tahfidz Quran

dilaksanakan setiap hari sehabis jam pelajaran berakhir yaitu mulai pukul 12.25 – 13.00 WIB. Ekstrakurikuler Tahfidz Quran terbagi menjadi 3 kelompok yakni: kelompok siswa yang belum dapat membaca dan menulis huruf Arab, masuk dalam program BTA (baca tulis al Quran), kelompok siswa yang belum lancar membaca al Quran, masuk dalam program kegiatan Binadhar al Quran dan kelompok yang sudah lancar membaca dan menulis huruf arab dan sudah bagus bacaan al Qurannya baik makhrojil huruf, fashahahnya, maupun tajwidnya, mereka masuk dalam program tahfidz Quran 2 Juz. (Hasil wawancara dengan Drs. Sugiarto, Koordinator Ekstrakurikuler MIN Pecabean, tanggal 14 Juli 2016).

3) Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana di Madrasah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi di MIN Pecabean juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di MIN Pecabean merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Menurut Ibu Nurningsih, S.Pd selaku Koordinator kegiatan peningkatan akhlak siswa bahwa pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula (Hasil wawancara dengan Ibu Nurningsih, S.Pd tanggal 5 Juli 2016).

Hal ini terkait dengan *panca prasetya* peserta didik MIN Pecabean yaitu: 1) membiasakan dan menjalankan peraturan dan tata tertib madrasah, 2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, 3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, 4) membina

dalam dirinya untuk berperilaku akhlakul karimah, 5) bekerja sama dan setia terhadap teman. Dengan adanya panca prasetya peserta didik MIN Pecabean ini bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di madrasah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada peserta didik. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Dalam rangka mendukung praktek anti korupsi tersebut penanaman nilai-nilai anti korupsi juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi madrasah perlu merencanakan suatu pembudayaan dan kegiatan pembiasaan lewat *panca prasetya* peserta didik. Pembiasaan inilah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa MIN Pecabean di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. (Hasil wawancara dengan Bapak Asep Hermansyah, S.Pd.I, tanggal 14 Juli 2016).

Menurut H. Shofar Sholahudin, S.ag., M.Pd (Hasil wawancara dengan Kepala MIN Pecabean, tanggal 6 Juni 2016) bahwa strategi Pembiasaan yang dilaksanakan yaitu:

a) Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara

Proses pembiasaan perilaku Anti Korupsi memerlukan adanya komitmen yang kuat dan tahan lama. Hal ini berarti perlu membangun komitmen secara terus menerus dengan berkelanjutan. Upaya membangun komitmen ini dilakukan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional. Pembacaan naskah “Komitmen Anti Korupsi” bisa dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara. Dengan pembacaan naskah komitmen ini akan dapat menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pembiasaan terhadap perilaku anti korupsi.

b) Pengadaan Kas Sosial Kelas

Pembiasaan perilaku Anti korupsi juga dilakukan melalui pengadaan kas sosial kelas. Kebiasaan mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab akan dapat membentuk pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Lebih dari itu dengan kas sosial kelas dapat membiasakan siswa untuk menjunjung tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

c) Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan

Salah satu perwujudan sikap jujur adalah tidak mau memiliki sesuatu benda apa pun yang bukan miliknya, meskipun benda itu hasil temuan dan ternyata tidak ada yang memiliki. Pembiasaan sikap ini sangat efektif dan relevan untuk dapat menghindari perilaku korupsi. Salah satu upaya untuk membiasakan sikap tersebut adalah dengan

mengadakan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan. Pos ini berfungsi sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga madrasah, baik yang ada pemiliknya maupun tidak ada pemiliknya. Warga madrasah yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang ditemukan orang lain dan diserahkan ke Pos tersebut. Tata cara dan mekanisme kerja pada Pos Kehilangan dan Barang Tak Bertuan ini bisa dirancang dengan semangat prasangka baik, namun harus disertai dengan mekanisme klarifikasi dengan mencatat identitas diri dan barang yang miliknya yang diambil, bagi seseorang yang mengaku kehilangan barang harus menyebutkan ciri-ciri, warna, atau bentuk barang yang dimaksud.

3. Evaluasi Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

Secara umum penilaian terdiri atas penilaian eksternal dan internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, maka penilaian yang layak untuk digunakan adalah internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

Menurut Asep Hermansyah, S.Pd.I., cara evaluasi pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabean yakni aspek kejujuran, disiplin, peduli, tanggungjawab, adil, sederhana, berani, kerja keras dan mandiri yaitu dengan cara evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan anti korupsi dalam sertiap individu, juga bisa dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas sekolah. Pada dasarnya, apa yang dilakukan individu akan memengaruhi kinerja komunitas. Transformasi sikap ini bukan hanya sebuah prestasi bagi siswa sebagai individu, tetapi juga sebuah prestasi bagi sekolah secara keseluruhan. Apa yang dilakukan individu memiliki makna dan berpengaruh bagi perkembangan MIN Pecabean. Inilah prinsip dasar pendidikan anti korupsi di madrasah (Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Hermansyah, S.Pd.I., tanggal 14 Juli 2016).

Disamping evaluasi di atas juga ada evaluasi portofolio. Portofolio sebagai *assesment* berarti mengandung makna bahwa dalam pendidikan anti korupsi alat untuk mengukur keberhasilan siswa adalah dengan menggunakan kumpulan hasil kerja (karya) terbaik siswa yang berisi berbagai pengalaman dan prestasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan. Sebagai contoh pada pelajaran IPS Kelas VI, siswa diminta untuk mengamati peristiwa atau artikel di koran/ majalah/intemet masalah korupsi kemudian siswa diminta untuk menganalisis mengapa terjadi korupsi?, factor apa penyebabnya?, bagaimana alternatif pemecahannya?, diantara beberapa alternatif pemecahan, mana yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik?. Jika telah dipilih altematif terbaik selanjutnya dicari peluang, prospek, dan tantangan ke depan (Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Hermansyah, S.Pd.I., tanggal 14 Juli 2016).

Evaluasi pendidikan anti korupsi di atas sebenarnya masih memiliki sudut pandang yang sifatnya kuratif-negatif, dalam arti, pendidikan anti korupsi dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk yang terjadi dalam

madrasah atau berkurangnya ketidakdisiplinan dan dalam diri siswa di dalam kegiatan madrasah. Misalnya, kriteria tentang jumlah siswa yang tidak bolos, tidak terlibat tindak kejahatan, narkoba, tidak lulus/ tidak naik kelas, tidak mencontek, tidak terlambat menyerahkan tugas, dan lain-lain, yang semuanya dimulai dengan kata kunci “tidak”.

Evaluasi seperti ini, sesungguhnya baru merupakan langkah awal sebab penghayatan nilai bukan semata-mata memiliki unsur kuratif, melainkan juga secara positif mampu meningkatkan kreativitas siswa secara keseluruhan. Kalau di sekolah tidak ada lagi yang membolos, tidak ada lagi yang terlibat tawuran pelajar, tidak ada lagi yang terlambat menyerahkan tugas, tidak ada lagi yang tidak naik kelas, tidak ada lagi yang menyontek, kriteria apa yang bisa kita pakai untuk menilai keberhasilan pendidikan antikorupsi? Kriteria ini tidak lain adalah kreativitas, yaitu inisiatif yang akan tampil secara keseluruhan performa yang dimiliki sekolah yang lazim kita sebut sebagai prestasi. Sekolah yang berprestasi pasti mampu mengatasi persoalan seputar perilaku tidak disiplin dan tidak jujur dalam diri siswa dan semakin mengarahkan diri siswa kepada hal positif yang semakin menyempurnakan kinerja pendidikan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean tidak bisa dipisahkan dari visi, misi dan tujuannya. Visi MIN Pecabean yakni terwujudnya madrasah ibtidaiyah yang Islami, unggul dan berkarakter. Sedangkan misinya: 1) menanamkan nilai-nilai ke-Islaman di Madrasah; 2) meningkatkan prestasi akademis dan non akademis; 3) Mengembangkan nilai budaya karakter; 4) Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara optimal; 5) Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat. Disamping itu MIN Pecabean juga memiliki *Panca Prasetya* peserta didik, yaitu 1) membiasakan

dan melaksanakan peraturan dan tata tertib madrasah, 2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, 3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, 4) membina dalam dirinya untuk berperilaku akhlakul karimah, 5) bekerja sama dan setia terhadap teman.

Proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan menggunakan sistem kuota artinya apabila madrasah ini berkapasitas 56 siswa dalam penerimaan peserta didik barunya, maka ketika pendaftar telah mencapai 56 peserta didik, pendaftaran akan ditutup. Jadi madrasah ini tidak menerapkan tes seleksi masuk dalam penerimaan siswa baru. Calon siswa yang daftar di MIN Pecabean berasal dari latar belakang sosial ekonomi, kecerdasan, agama, budaya, etnik maupun ras yang heterogen, mereka dapat diterima menjadi siswa MIN Pecabean sepanjang lulus wawancara dan belum terpenuhinya kuota yaitu 56 anak. Calon siswa yang mendaftarkan diri di MIN Pecabean ini kemudian di seleksi dengan wawancara, akan tetapi wawancara ini bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya calon siswa, akan tetapi seleksi ini di gunakan untuk mengetahui motivasi yang dimiliki oleh calon siswa apakah benar-benar memiliki kemauan dan motivasi yang kuat untuk menjadi siswa di MIN Pecabean. Berdasarkan seleksi dengan cara wawancara ini maka sudah dapat dipastikan calon siswa yang diterima. Di samping seleksi, ada wawancara dan observasi yang dilakukan pihak madrasah dengan orang tua/ wali siswa, digunakan dalam rangka untuk mengetahui motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di MIN Pecabean.

2. Analisis Proses Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Tegal

Analisis pada proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal, sebagai berikut :

Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal dimulai dengan adanya sosialisasi pada waktu upacara bendera setiap hari senin dan pada acara rapat pembinaan dewan guru pada setiap hari Rabu sore. Di samping itu proses pendidikan anti korupsi dilakukan dengan dengan cara budaya disiplin

madrasah, di MIN Pecabean ini siswa masuk kelas pukul 06.30 WIB, dan pelajaran berakhir pada pukul 12.25 WIB. Setelah pelajaran berakhir ada program baca tulis Al Quran dan Tahfidz Quran, yang berakhir pukul 13.00 WIB. Program ini mempunyai target siswa lulus dari MIN Pecabean sudah hafal 2 Juz dari Al Quran.

Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada diri siswa MIN Pecabean yaitu: jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli. Model dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabean ada tiga yaitu: model terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan, pembiasaan nilai pada seluruh aktifitas dan suasana di madrasah.

Pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara terintegrasi dengan mata pelajaran dan bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali dan semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri peserta didik tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran. Namun, pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik. Dalam setiap awal pembelajaran guru selalu menyisipkan materi-materi anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adil, mandiri, peduli dan sederhana.

Dengan cara memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan materi pelajaran yang sedang disampaikan.

Model pendidikan anti korupsi di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler pada MIN Pecabean dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi melalui aktivitas dan pengalaman nyata siswa. Penanaman nilai anti korupsi di MIN Pecabean dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya, dengan model ini peserta didik sungguh mendapat nilai melalui pengalaman – pengalaman kongkrit. Pengalaman akan lebih tertanam dalam diri peserta didik jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog. Peserta didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggembarakan. Namun belum ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di madrasah dan membutuhkan waktu lebih banyak. Model ini menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama.

Adapun Kegiatan ekstrakurikuler di MIN Pecabean meliputi: ekstrakurikuler Calung, Pramuka, dan ekstrakurikuler tahfidz Quran. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap seminggu sekali kecuali ekstrakurikuler tahfidz Quran, sebab ekstrakurikuler tahfidz Quran dilaksanakan setiap hari sehabis jam pelajaran berakhir yaitu mulai pukul 12.25 – 13.00 WIB. Ekstrakurikuler Tahfidz Quran terbagi menjadi 3 kelompok yakni: kelompok siswa yang belum dapat membaca dan menulis huruf Arab, masuk dalam program BTA (baca tulis al Quran), kelompok siswa yang belum lancar membaca al Quran, masuk dalam program kegiatan Binadhar al Quran dan kelompok yang sudah lancar membaca dan menulis huruf arab dan sudah bagus

bacaan al Qurannya baik makhrojil huruf, fashahahnya, maupun tajwidnya, mereka masuk dalam program tahfidz Quran 2 Juz.

Penanaman nilai-nilai anti korupsi di MIN Pecabean juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di MIN Pecabean merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. ada juga *Panca prasetya* peserta didik MIN Pecabean yaitu: 1) membiasakan dan menjalankan peraturan dan tata tertib madrasah, 2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, 3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, 4) membina dalam dirinya untuk berperilaku akhlakul karimah, 5) bekerja sama dan setia terhadap teman. Dengan adanya *panca prasetya* peserta didik MIN Pecabean ini bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di madrasah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Sedangkan strategi Pembiasaan yang dilaksanakan yaitu:

a) Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara

Upaya membangun komitmen anti korupsi dilakukan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional. Pembacaan naskah “Komitmen Anti Korupsi” bisa dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan

oleh semua peserta upacara. Dengan pembacaan naskah komitmen ini akan dapat menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pembiasaan terhadap perilaku anti korupsi.

b) Pengadaan Kas Sosial Kelas

Pembiasaan perilaku Anti korupsi juga dilakukan melalui pengadaan kas sosial kelas. Kebiasaan mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab akan dapat membentuk pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Lebih dari itu dengan kas sosial kelas dapat membiasakan siswa untuk menjunjung tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

c) Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan

Salah satu upaya untuk membiasakan sikap anti korupsi adalah dengan mengadakan pos kehilangan dan benda tak bertuan. Pos ini berfungsi sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga MIN Pecabean, baik yang ada pemiliknya maupun tidak ada pemiliknya. Warga MIN Pecabean yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang yang telah ditemukan orang lain dan diserahkan ke pos tersebut. Tata cara dan mekanisme kerja pada Pos Kehilangan dan Barang Tak Bertuan ini dirancang dengan semangat prasangka baik, namun harus disertai dengan mekanisme klarifikasi dengan mencatat identitas diri dan barang miliknya yang hilang, dengan menyebutkan ciri-ciri, warna, atau bentuk barang yang dimaksud.

3. Analisis Evaluasi Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Tegal

Pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal merupakan sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan semua mata pelajaran, dilaksanakan juga di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler serta dilaksanakan pula dengan pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana di madrasah. Kegiatan tersebut

merupakan suatu program pembelajaran tersembunyi (*hidden learning*), dikarenakan suatu pembelajaran maka *endingnya* tetap harus dilakukan evaluasi.

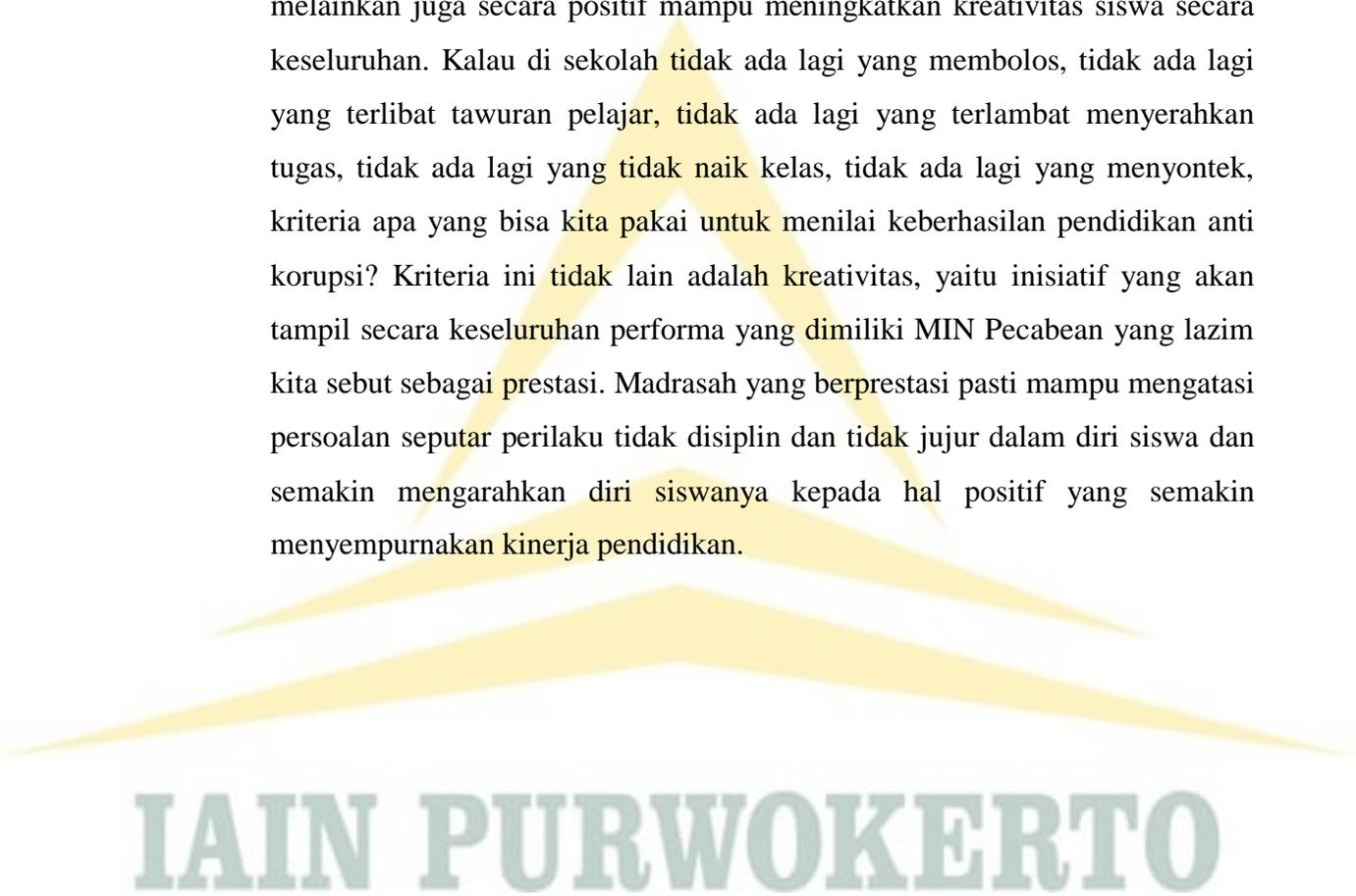
Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara penilaian eksternal dan internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, maka penilaian yang layak untuk digunakan adalah internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran.

Evaluasi pendidikan anti korupsi pada aspek kejujuran, disiplin, peduli, tanggungjawab, adil, sederhana, berani, kerja keras dan mandiri dilakukan dengan cara evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan anti korupsi dalam sertiap individu, juga bisa dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas sekolah. Transformasi sikap ini bukan hanya sebuah prestasi bagi siswa sebagai individu, tetapi juga sebuah prestasi bagi sekolah secara keseluruhan. Disamping evaluasi obyektif, juga dilaksanakan evaluasi portofolio. Portofolio sebagai *assesment* berarti mengandung makna bahwa dalam pendidikan anti korupsi alat untuk mengukur keberhasilan siswa adalah dengan menggunakan kumpulan hasil kerja (karya) terbaik siswa yang berisi berbagai pengalaman dan prestasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan.

Evaluasi pendidikan anti korupsi di atas sebenarnya masih memiliki sudut pandang yang sifatnya kuratif-negatif, dalam arti, pendidikan anti

korupsi dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk yang terjadi pada MIN Pecabean atau berkurangnya ketidakdisiplinan dan dalam diri siswa di dalam kegiatan MIN Pecabean.

Evaluasi seperti ini, sesungguhnya baru merupakan langkah awal sebab penghayatan nilai bukan semata-mata memiliki unsur kuratif, melainkan juga secara positif mampu meningkatkan kreativitas siswa secara keseluruhan. Kalau di sekolah tidak ada lagi yang membolos, tidak ada lagi yang terlibat tawuran pelajar, tidak ada lagi yang terlambat menyerahkan tugas, tidak ada lagi yang tidak naik kelas, tidak ada lagi yang menyontek, kriteria apa yang bisa kita pakai untuk menilai keberhasilan pendidikan anti korupsi? Kriteria ini tidak lain adalah kreativitas, yaitu inisiatif yang akan tampil secara keseluruhan performa yang dimiliki MIN Pecabean yang lazim kita sebut sebagai prestasi. Madrasah yang berprestasi pasti mampu mengatasi persoalan seputar perilaku tidak disiplin dan tidak jujur dalam diri siswa dan semakin mengarahkan diri siswanya kepada hal positif yang semakin menyempurnakan kinerja pendidikan.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, penyajian data, temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Sistem rekrutmen siswa baru MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara seleksi bukan tes, dengan cara *interview*, jumlah siswa baru yang diterima dibatasi jumlahnya sesuai dengan daya tampung kelas yang disediakan yaitu 2 kelas atau 56 siswa, sebab satu kelas maksimal 28 siswa. disamping itu orang tua/ wali siswa juga di *interview* dan di observasi dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana kemauan dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke MIN Pecabean.
 - b) MIN Pecabean memiliki *Panca Prasetya* peserta didik, yaitu: 1) membiasakan dan melaksanakan peraturan dan tata tertib madrasah, 2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, 3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, 4) membina dalam dirinya untuk berperilaku dengan akhlakul karimah, 5) bekerja sama dan setia terhadap teman. *Panca prasetya* peserta didik ini merupakan suatu sumpah setia siswa MIN Pecabean untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan madrasah maupun di masyarakat.
2. Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan:
 - a. Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal dimulai dengan adanya sosialisasi pada waktu upacara bendera setiap hari senin dan pada acara rapat pembinaan dewan guru pada setiap hari Rabu sore dan dengan cara budaya disiplin madrasah.

- b. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada diri siswa MIN Pecabean yaitu: jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.
 - c. Model dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabean ada tiga yaitu: model terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan, pembiasaan nilai pada seluruh aktivitas dan suasana di madrasah.
 - d. Strategi Pembiasaan yang dilaksanakan pada pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yaitu: penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara, pengadaan kas sosial kelas dan pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan.
3. Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yakni dengan cara penilaian internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. sedangkan evaluasi pendidikan anti korupsi pada aspek kejujuran, disiplin, peduli, tanggungjawab, adil, sederhana, berani, kerja keras dan mandiri dilakukan dengan cara evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan anti korupsi dalam sertiap individu, juga dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas madrasah.

B. Saran-saran

1. Kepada Kepala MIN Pecabean Kabupaten Tegal:
 - a) Agar tetap mempertahankan prestasi dan kualitas pendidikan yang telah diraihny, dan terus meningkatkan kualitas lulusannya, karena masyarakat telah menaruh kepercayaan terhadap MIN Pecabean Kabupaten Tegal, yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan negeri/swasta di Kabupaten Tegal.

b) Melakukan studi banding ke madrasah yang telah menyelenggarakan pendidikan dengan model *boarding school* berbasis tahfidz Quran yang lebih maju, untuk *sharing* pengalaman sekaligus memacu semangat guru dalam menjalankan tugas mulia, memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya.

2. Kepada Guru :

Menambah kajian-kajian tentang pembelajaran berbasis cara kerja otak, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para pakar *neuroscientist*.

3. Kepada Kantor Kemenag Kabupaten Tegal

Sebagai pembina pendidikan MIN, diharapkan segera memberikan support dan layanan pendidikan anti korupsi di Kabupaten Tegal, dari jenjang MI, MTs maupun MA baik negeri maupun swasta.

4. Kepada Peneliti lain.

Agar diadakan penelitian lanjutan ke lembaga-lembaga pendidikan lain yang mampu mengungkap lebih luas tentang implementasikan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah.

C. Rekomendasi

Setelah mencermati pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal, dikemukakan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kepala madrasah hendaknya dalam melaksanakan tugas sebagai supervisor yang diembannya selalu memperhatikan dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah yang dipimpinnya.
2. Para guru hendaknya dalam menjalankan proses pendidikan anti korupsi dapat mengamati para siswanya sebagai pribadi yang unik dan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Guru harus dapat melaksanakan pendidikan anti korupsi yang dapat menginternalisasi nilai-nilai ke dalam jiwa siswa, guru sebaiknya

meningkatkan kualitas kompetensi dalam mengelola pendidikan anti korupsi tersebut, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, desain lingkungan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

3. Para siswa hendaknya tidak perlu takut, ragu, dan malu untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses pendidikan anti korupsi karena setiap siswa punya potensi untuk memiliki jiwa anti korupsi .

D. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah Swt atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya lah maka laporan penelitian individual ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini dari tahap awal sampai akhir, dimana banyak sumbangan pemikiran yang peneliti terima, baik itu dalam bentuk diskusi, informasi, buku maupun dalam bentuk yang lain.

Sungguhpun demikian, peneliti menyadari betul akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka sudah tentu ada beberapa hal yang menjadi kelemahan laporan ini. Maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari siapa saja guna perbaikan laporan penelitian individual ini. Akhirnya semoga laporan penelitian individual ini dapat bermanfaat bagi peneliti, kepala madrasah ibtidayah dan guru khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin.*

IAIN PURWOKERTO

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas.
- Buchori, Mochtar.1994. *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Budiningsih, C. A. 2004. *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Cropley. A.J. 1998. *Pendidikan Seumur Hidup, Suatu Analisis Psikologis*, (terj. Sardjan Kadir). Surabaya : Usaha Nasional.
- Dananjaya, Utomo. 2010. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat Bahasa Depdiknas.
- Depdiknas.2009. *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*.Jakarta: Depdiknas.
- _____, *Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- _____, 2004. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Balitbang.
- _____, 2009. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (life skill)*. Jakarta: Depdiknas.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan* Jakarta: Depdiknas.
- _____, 2009. Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

- Fishbein, M, dan Ajzein I. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Sydney: Addison-Wesley Publishing.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widya Karya.
- Harahab, H, M. 2009. *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Kartono, Kartini. 1997. *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Klitgaard, R. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.
- Lickona, Thomas,. 1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Lucio, William H., McNeil, John D. 1969. *Supervision: a Shyntesis of Thought and Action New York: McGries Hill Book Company*.
- Maheka, A. 2006. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK
- Moleong Lexy J.,2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nata, Abuddin .2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Kapita Selektta Pendidikan Islam. Jakarta: Grassindo
- Nasution, S. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qodir dkk,. 2003.*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media Wacana Press.

- S, Azwar. 2006. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strauss, Anselm & Juliet, Corbin (terj).2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2.
- Sugiono, 2005. *Metodologi Penelitian* . Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto, Totok. 2005. *Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah*. Yogyakarta: Gama Media
- Suyitno, ed. 2006. *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Thompson, James.1993. *Developing Education*. Toronto: NewGrace.inc
- Thorndike R.L, & Hagen E., 1992. *Measurement & Evaluation in Psychology and Education*. Toronto: John Wiley and Sons Inc.
- Tilaar, HAR. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wade, C, dan Tavris, C. 2007. *Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanto, et. Al. (2010). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

IAIN PURWOKERTO

Jadwal Pelaksanaan

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MIN PECABEAN

KABUPATEN TEGAL

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Dosen Tahun 2016

NO	KEGIATAN	Januari				Pebruari				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal		x	x	x								
2	Pembuatan proposal		x	x	x	x	x						
3	Pengumpulan data											x	x
4	Pengolahan data												
5	Analisa data												
6	Penulisan laporan												

NO	KEGIATAN	Mei – Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal												
2	Pembuatan proposal												
3	Pengumpulan data	x	x	x	x	x							
4	Pengolahan data					x	x	x	x	x			
5	Analisa data				x	x	x	x	x	x	x		
6	Penulisan laporan					x	x	x	x	x	x		

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

Responden : Kepala MIN Pecabean Kabupaten Tegal

1. Kapanakah madrasah ibtidaiyah negeri ini berdiri? Apakah visi, misi dan tujuan pendirian lembaga pendidikan ini?
2. Apakah lembaga pendidikan ini sudah menerapkan budaya sekolah? Bagaimana prosedurnya?
3. Kapanakah madrasah ibtidaiyah negeri ini menerapkan pendidikan anti korupsi? Mengapa tertarik melaksanakan pendidikan anti korupsi di lembaga ini?
4. Bagaimanakah reaksi guru-guru di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Mendukung atau tidak?
5. Apakah madrasah ibtidaiyah negeri memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi terkait dengan pengelolaan, proses dan evaluasinya?
6. Bagaimanakah pengelolaan input siswa di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah ada kuota atau tidak? Apakah ada tes atau tidak? Untuk apa? mengapa?
7. Bagaimanakah pengelolaan proses pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah guru buat perencanaan pendidikan anti korupsi atau tidak? Bagaimana prosedurnya?
8. Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi berlangsung di madrasah ibtidaiyah negeri ini?
9. Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah siswa diuntut mencapai target yang telah ditentukan oleh madrasah ibtidaiyah negeri atau tidak? Bagaimanakah tolak ukur dari pendidikan anti korupsi? Bagaimana prosedurnya?
10. Bagaimanakah startegi madrasah ibtidaiyah negeri ini melaksanakan pendidikan anti korupsi? Apakah merupakan mata pelajaran yang mandiri ataukah include pada semua mata pelajaran?
11. Bagaimanakah pelatihan bagi guru-guru di madrasah ibtidaiyah negeri ini dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi?

12. Bagaimanakah mengevaluasi kinerja guru pada pendidikan anti korupsi? apakah konsekuensi dari evaluasi kinerja guru tersebut?

Responden : Guru MIN Pecabean Kabupaten Tegal

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pendidikan anti korupsi yang diterapkan di madrasah ibtidaiyah negeri ini?
2. Apakah anda mendukung hal itu?
3. Apakah madrasah ibtidaiyah negeri memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi terkait dengan pengelolaan, proses dan evaluasinya?
4. Bagaimanakah pengelolaan pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah ada kuota atau tidak? Apakah ada tes atau tidak? Untuk apa? mengapa?
5. Bagaimanakah pengelolaan proses pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah guru buat perencanaan pendidikan anti korupsi atau tidak? Bagaimana prosedurnya?
6. Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi berlangsung di madrasah ibtidaiyah negeri ini?
7. Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah siswa di tuntutan mencapai target yang telah ditentukan oleh madrasah ibtidaiyah negeri atau tidak? Bagaimanakah tolak ukur dari pendidikan anti korupsi? Bagaimana prosedurnya?
8. Bagaimanakah startegi madrasah ibtidaiyah negeri ini melaksanakan pendidikan anti korupsi? Apakah merupakan mata pelajaran yang mandiri ataukah include pada semua mata pelajaran?
9. Bagaimanakah pelatihan bagi guru-guru di madrasah ibtidaiyah negeri ini dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi?
10. Bagaimana bentuk pembelajaran di kelas?
11. Apakah siswa diajak untuk melakukan praktek dalam proses pendidikan anti korupsi?

12. Apakah anda mengajak siswa untuk merefleksikan tentang proses pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan?
13. Bagaimana menerapkan penilaian untuk mengetahui keberhasilan pendidikan anti korupsi?

Responden : Staff Administrasi MIN Pecabean Kabupaten Tegal

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pendidikan anti korupsi yang diterapkan di madrasah ibtidaiyah negeri ini?
2. Apakah anda mendukung hal itu?
3. Apakah madrasah ibtidaiyah negeri memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi terkait dengan pengelolaan, proses dan evaluasinya?
4. Bagaimanakah pengelolaan pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah ada kuota atau tidak? Apakah ada tes atau tidak? Untuk apa? mengapa?
5. Bagaimanakah pengelolaan proses pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah guru buat perencanaan pendidikan anti korupsi atau tidak? Bagaimana prosedurnya?
6. Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi berlangsung di madrasah ibtidaiyah negeri ini?
7. Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah negeri ini? Apakah siswa diuntut mencapai target yang telah ditentukan oleh madrasah ibtidaiyah negeri atau tidak? Bagaimanakah tolak ukur dari pendidikan anti korupsi? Bagaimana prosedurnya?
8. Bagaimanakah startegi madrasah ibtidaiyah negeri ini melaksanakan pendidikan anti korupsi? Apakah merupakan mata pelajaran yang mandiri ataukah include pada semua mata pelajaran?
9. Bagaimanakah pelatihan bagi guru-guru di madrasah ibtidaiyah negeri ini dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi?
10. Bagaimanakah mengevaluasi kinerja guru? apakah konsekuensi dari evaluasi kinerja guru?